

PROSIDING LOKAKARYA NASIONAL 2021

Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan,
Rencana, dan Program Pengelolaan Lingkungan di Daerah

Semarang, 14 Juli 2021

MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Dr. Lilin Budiati, SH., MM.
Prof. Dr. Ir. Sri Puryono, MP.

Tim Penyusun:
Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, M.Sc.
Dr. R.B. Sularto, Sh., M.Hum.

PROSIDING
LOKAKARYA NASIONAL
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA-UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana,
Dan Program Pengelolaan Lingkungan Di Daerah

Semarang, 14 Juli 2021

Penerbit:
Sekolah Pascasarjana UNDIP

PROSIDING
LOKAKARYA NASIONAL MAGISTER ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCA
SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana Dan Program
Pengelolaan Lingkungan Di Daerah

SUSUNAN PANITIA:

Organizing Committee:

Ketua : Patria Rizky Ananda
Sekretaris : Saputra Hasthi
Sie Acara : Rr. Gayatri Hanna
 : Reza Muzzamil Jufri
Sie Publikasi : Merry Yohana P
 : Ika Petra Buana
 : Aninda Windy R
Sie Dokumentasi : Augusto Almeida
 : Sandra Mas Malinta

Steering Committee:

1. Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, M.S
2. Prof. Dr. Ir. Sri Puryono, MP.
3. Dr. R.B. Sularto, S.H., M. Hum.
4. Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M.

Reviewer : Prof. Dr. Ir. Hadiyanto, S.T., M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Editor : Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M.

Penerbit :
Sekolah Pascasarjana Undip
Jl. Imam Bardjo, SH No. 3-5 Semarang
Telp: 024-8318856, 8442990
Fax: 024-8449608
Email: sps@live.undip.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

KATA PENGANTAR

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang telah menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema “Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan”. Penyelenggaraan Lokakarya Nasional ini merupakan luaran dalam pembelajaran mata kuliah Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan (PDPL) 2021. Tujuan dari pelaksanaan Lokakarya Nasional ialah untuk mengetahui dan menilai sejauh mana TPB telah menjadi agenda pembangunan lokal dan diimplementasikan di daerah. Penilaian didasarkan pada hasil pengukuran atas aspek-aspek: indikator lokal, inklusi, integrasi vertikal dan horizontal serta koherensi kebijakan. Hasil penilaian ini nantinya dapat digunakan untuk merumuskan dan merancang *instrument* dan *tool* untuk mengukur, menilai dan mengevaluasi pelokalan dan implementasi TPB di daerah.

Kegiatan ini adalah perwujudan dari peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai sebagai agen perubahan dan sekaligus agen transfer pengetahuan dengan tema sebagaimana telah disebutkan diatas. Pembukaan acara dilakukan oleh Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc. Pada penyelenggaraan Paparan pertama disajikan oleh perwakilan mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan yang dilanjutkan paparan oleh narasumber lainnya meliputi : Ir. Edison Siagian, ME dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi dari UCLG-ASPAC; Dr. Drs. Amirudin, M.Si dan ditutup dengan paparan dari tim peneliti Universitas Diponegoro yang diwakilkan oleh Dr. Lilin Budiati, SH.,MM.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan dalam pengelolaan lingkungan (pendekatan sistem, pendekatan *Driving Force- Pressure- State- Impact- Response (DPSIR)*, framework langkal-langkah pelokalan TPB dalam Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan)). Akademisi dan pemerhati bidang Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengirimkan gagasannya dalam bentuk powerpoint (PPT) kepada penyelenggara lokakarya nasional. Terdapat lima topik yang dibahas dalam lokakarya nasional yaitu: (I) Review inklusi, integrasi, dan koherensi RPJMD dengan TPB, (II) Jejaring-Kerja Lintas Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan, dan Program untuk Implementasi TPB dalam Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan, (III) Menuju Pelokalan TPB dalam Agenda Pembangunan Lokal – Regional di Indonesia, (IV) Percepatan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Melalui Program dan Proyek Inkubator Bisnis/Industri Di Daerah (V) Identifikasi Indikator Lokal, Penilaian Inklusi, Koherensi, Integrasi TPB Pada Kebijakan, Rencana Dan Program Pembangunan Serta Pengelolaan Lingkungan Di Daerah.

Secara keseluruhan pelaksanaan lokakarya nasional ini menghasilkan luaran yang melampaui harapan. Luaran tersebut antara lain: (i) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan; (ii) Rekapitulasi hasil review tentang inklusi, integrasi, dan koherensi RPJMD dengan TPB; (iii) Prosiding dan (iv) Jurnal. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada

semua pembicara yang telah menyumbangkan pengetahuannya. Kepada panitia lokakarya, kami juga mengucapkan terimakasih atas kerja kerasnya sehingga lokakarya nasional dan prosiding ini dapat terwujud. Sekaligus kami memohon kritik serta saran yang membangun bagi semua pihak karena masih banyaknya kekurangan dalam kegiatan lokakarya nasional yang kami selenggarakan.

Semarang, Juli 2021

Dr. Eng. Maryono, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro Semarang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
SAMBUTAN-SAMBUTAN.....	vii
PENJELASAN KEGIATAN.....	1
1. REVIEW INKLUSI, INTEGRASI DAN KOHERENSI RPJMD DAN IDENTIFIKASI INDIKATOR LOKAL, PENILAIAN INKLUSI, KOHERENSI, INTEGRASI TPB PADA KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI DAERAH Reza Muzzamil Jufri, Dr. Lilin Budiati, SH.MM.....	7
2. JEJARING-KERJA LINTAS KEBIJAKAN, REGULASI, KELEMBAGAAN DAN PROGRAM UNTUK IMPLEMENTASI TPB DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Dr.Drs.Amirudin, M.Si	
3. MENUJU PELOKALAN TPB DALAM AGENDA PEMBANGUNAN LOKAL-REGIONAL DI INDONESIA Dr.Bernadia Irawati Tjandradewi	
4. UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) OLEH PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LINGKUNGAN Ir. Edison Siagian, ME	
5. DAFTAR PUSTAKA.....	27
6. LAMPIRAN.....	34

SAMBUTAN WAKIL DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Disampaikan oleh Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc dalam Lokakarya Nasional dengan tema Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan Di Daerah melalui aplikasi zoom meeting di Semarang pada hari Rabu, 14 Juli 2021.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kedatangan para hadirin, yang saya hormati:

1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Bapak Ir. Edison Siagian, ME. (pemateri)
2. Sekjen UCLG- ASPAC , Ibu Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi (pemateri)
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Drs. Edi Wahyono, M.Si. (pemateri)
4. Kepala Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana dan lingkungan Bappeda Kota Semarang, Bapak M. Luthfi Eko Nugroho, ST., MT. (pemateri)
5. Sekda Kabupaten Wonosobo, Bapak Drs. One Andang Wardoyo, M.Si (pemateri)
6. Ketua SDGs Center Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Drs. Amirudin, M.Si. (pemateri)
7. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Bapak Dr. Eng. Maryono, ST, MT.
8. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
9. Seluruh peserta, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini perkenankan kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara Lokakarya Nasional dengan tema “PELOKALAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI DAERAH” dapat terselenggara pada waktunya dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Berikutnya adalah apresiasi kami kepada para tim peneliti dan dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Daerah dan pengelolaan Lingkungan, panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk merealisasikan lokakarya, serta para peserta atas perhatian dan animonya untuk ikut serta bertukar gagasan, berbagi pengetahuan dan pengalaman di dalam forum ini.

TPB adalah konsep global yang berasal dari orang luar (*from others*) sehingga risiko dianggap bukan diri kita (*not self*) atau bukan milik kita (*not mine*), dan kemudian ditolak, atau minimal tidak dilaksanakan adalah sangat tinggi. Berkenaan dengan hal itu, TPB perlu diinternalisasikan menjadi bagian dari diri kita (*self*) yang bersifat lokal dan spesifik. Ketika eksternalitas (sesuatu yang berasal dari luar/global) bertransformasi menjadi internalitas (sesuatu yang berada di dalam) yang bersifat lokal, maka implementasinya akan berlangsung lancar, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, pelokalan TPB adalah keniscayaan yang tidak terelakkan, dan menjadi fokus kepedulian dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Pada hakikatnya, dibutuhkan instrumen, alat bantu (*tool*), dan kerangka kerja (*framework*) untuk melokalkan dan mengimplementasikan TPB.

Mulai dari hulu ke hilir, setidaknya terdapat empat domain dalam proses pelokalan dan implementasi TPB, yaitu: kebijakan, regulasi, indikator lokal & perencanaan, serta tatakelola.

Tantangan terbesarnya terletak pada aspek: koherensi kebijakan, penyesuaian struktural melalui kerangka regulasi, pembiayaan, dan kapasitas serta kapabilitas sumber daya manusia. Pada konteks untuk mengantisipasi tantangan itulah, diselenggarakan proses pembelajaran publik melalui forum lokakarya ini. Aktor, *stakeholder*, *civil society organization* (CSO), sektor privat, dan khususnya para mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan (MIL) dapat menjalani proses pembelajaran interaktif berbasis kompetensi (*Competence Based Learning*). Tujuan dari proses pembelajaran ini antara lain: (i) mengidentifikasi indikator lokal TPB; (ii) menilai kinerja pelokalan TPB dengan cara mereview dokumen RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota; dan (iii) analisis penilaian kebutuhan (*Needs Assessment Analysis*). Luaran yang diharapkan dapat dihasilkan melalui lokakarya ini adalah: (i) prosiding lokakarya; (ii) Instrumen & *tool* pelokalan dan implementasi TPB; dan (iii) Laporan riset pelokalan dan implementasi TPB.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat menjalani acara lokakarya. Semoga lancar, sukses dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Disampaikan dalam Lokakarya Nasional dengan tema Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan Di Daerah melalui aplikasi zoom meeting di Semarang pada hari Rabu, 14 Juli 2021.

Yth. Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi Sekolah Pascasarjana UNDIP

Yang Kami Hormati Para Pembicara dan Penanggap dalam Lokakarya Nasional ini

Yang Kami Hormati Dosen Prodi Magister Ilmu Lingkungan UNDIP serta para peserta dan hadirin Sekalian.

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Lokakarya serta para undangan yang saya hormati, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Lokakarya Nasional yang telah berjalan dengan lancar.

Lokakarya dengan tema: "PELOKALAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI DAERAH" bertujuan mengidentifikasi sejauh mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah terinklusi secara koheren dan terpadu di dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan di daerah. Inklusi, koherensi, dan integrasi adalah tiga parameter yang dipakai untuk menilai sejauh mana dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Wonosobo dapat mencerminkan tingkat pelokalan TPB di Wilayah Kawa Tengah.

Temuan hasil review mahasiswa dan tim peneliti Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (MIL) Universitas Diponegoro Semarang, menunjukkan fakta-fakta bahwa: (i) secara umum tingkat pelokalan TPB di Provinsi Jawa Tengah adalah tinggi (> 70%), tingkat pelokalan kota Semarang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah, namun masih dalam kategori tinggi, sedangkan kabupaten Wonosobo termasuk kategori rendah; (ii) kota Semarang diuntungkan oleh tiga hal: ibu kota provinsi, kota maritim sekaligus pusat industri – perdagangan, sehingga mengalami dua fenomena disagregasi dan aglomerasi secara simultan. Hal ini membuat kota Semarang menjadi entitas sistem yang paling dinamis diantara kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah; (iii) Visi dan kebijakan yang masih belum berorientasi ke masa depan, berjangka pendek, parsial dan sektoral, skenario perencanaan sebagian besar masih liner, serta tidak adanya basis data adalah tantangan dan kendala yang berhasil diidentifikasi pada lokakarya ini; (iv) kapasitas SDM dan anggaran juga menjadi hambatan; dan (v) belum adanya instrumen, alat bantu (*tool*) manajemen seperti dashboard, dan kerangka kerja (*framework*) yang dapat dipakai untuk mempercepat pelokalan dan implementasi TPB.

Mencermati beberapa temuan tersebut, maka kegiatan lokakarya nasional ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan riset dan pengembangan untuk menciptakan instrumen, alat bantu (*tool*) manajemen, serta kerangka kerja (*framework*) pelokalan dan implementasi TPB. Selain itu, perlu juga dikembangkan

berbagai program inkubator yang dapat mempercepat implementasi TPB. Kerjasama lintas sektoral, lintas disiplin keilmuan, lintas level tatakelola, dan lintas negara perlu digalakkan. Langkah-langkah strategis tersebut akan mempercepat proses internalisasi TPB melalui tahapan-tahapan: rekognisi, adopsi, adaptasi, difusi, dan transformasi. Manakala internalisasi TPB menjadi entitas yang bersifat “diri sendiri (*being self*)” telah berhasil secara efektif, serta merta proses implementasi akan menjadi lancar dengan sendirinya.

Pada akhirnya, kami menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta, penyelenggara, dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya bahwa lokakarya ini telah berlangsung sesuai dengan harapan. Namun demikian, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan lokakarya ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga sekecil apapun yang diperoleh dari kegiatan ini dapat memberikan nilai-nilai kedayagunaan, kepraktisan, dan kemanfaatan bagi kita semua.

Wassallamualaikum Wr.Wb.

PENJELASAN KEGIATAN

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Menyoroti fakta-fakta tentang pola konsumsi dan produksi, cara pemanfaatan sumber daya, eskalasi ketimpangan di berbagai faset pembangunan, terlebih lagi belum tertanamnya substansi maupun esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada agenda pembangunan daerah, telah menjadikan masyarakat rentan dalam berbagai bidang serta tidak kompatibel untuk merealisasikan TPB pada tahun 2030. TPB lebih berupa isu dan agenda pembangunan nasional di berbagai negara tetapi belum sampai tertanam (embedded) sebagai muatan lokal pembangunan daerah. Berbagai badan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan secara eksplisit tentang urgensi melokalkan agenda global pencapaian TPB pada tahun 2030 menjadi agenda, kebijakan, dan rencana pembangunan pemerintah lokal - regional (Local – Regional Governments/ LRGs) (UCLG, 2019).

Kota-kota menjadi menjadi aktor kunci pada arena pelaksanaan pembangunan berkelanjutan karena perannya sebagai pusat pertumbuhan yang menggerakkan dua fenomena krusial yaitu urbanisasi dan aglomerasi. Lebih dari separuh populasi global tinggal di wilayah perkotaan, dan dari 2015–2030 populasi di perkotaan akan bertambah lebih dari 1 milyar orang yang sebagian besar tinggal di kota-kota Asia dan Afrika. Kota di abad 21 mengalami tekanan berat akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi, sehingga menjadi faktor determinan kunci dalam menentukan keberhasilan TPB pada 2030. Di sisi lain, konsentrasi populasi, infrastruktur, pelayanan, inovasi, produksi, dan aglomerasi di wilayah perkotaan, adalah potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk membuat platform pembangunan daerah yang menunjang pencapaian TPB pada 2030 (Stepputat et al., 2016). Peran pembangunan daerah (lokal – regional atau kota – kabupaten – provinsi) adalah krusial dan secara kumulatif menentukan keberhasilan pemerintah pusat dalam merealisasikan TPB. Pada kawasan regional Asia-Pasific konsep pelokalan TPB adalah sangat relevan.

Negara-negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia, mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi tinggi dan cepat. Hal ini menimbulkan tekanan berat pada kapasitas komunitas lokal terutama pada aspek-aspek perencanaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan. Perubahan iklim berdampak meningkatkan kerentanan dan risiko pada masyarakat di wilayah perkotaan (Oosterhof – ADB, 2018). Pertumbuhan kota terjadi karena beragam sebab antara lain; kapitalisasi, pemekaran regional, urbanisasi dan/atau migrasi desa – kota, aglomerasi, dan sebagainya. Pertumbuhan cepat pada berbagai kota di Indonesia adalah refleksi dari ketimpangan diantara beragam sektor dan faset pembangunan (Keban et al., 2017). Ketimpangan pembangunan adalah pangkal persoalan yang membuat masyarakat menjadi rentan, tidak siap, serta tidak kompatibel untuk merealisasikan TPB pada 2030. Di sisi lain, tekanan pertumbuhan cepat dan aglomerasi akan berdampak serius pada degradasi kualitas dan penurunan daya dukung lingkungan. Dibutuhkan

inisiatif kebijakan dari tiap kepala daerah baik di level provinsi maupun kabupaten kota, kerangka regulasi dan kelembagaan untuk menjadikan TPB sebagai muatan lokal dalam agenda, perencanaan, dan program pembangunan daerah serta pengelolaan lingkungan. Bertolak dari pengalaman masa lalu, dimana kemakmuran dan kesejahteraan yang diupayakan melalui pembangunan ternyata dicapai dengan cara mengeksploitasi lingkungan melebihi kapasitas dan daya dukungnya, maka pengelolaan lingkungan menjadi unsur yang selalu melekat pada domain pembangunan daerah. Laporan dari Network of Regional Governments for Sustainable Developments (NRG4SD) menyatakan bahwa: (i) Hampir 92% pemerintah daerah di berbagai negara familier dengan TPB dan berada di tahap awal atau lanjut implementasi; (ii) 87% mempunyai kebijakan atau program spesifik dalam mengimplementasikan TPB. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di berbagai negara secara aktif meretas jalan untuk mengimplementasikan TPB di wilayahnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan TPB adalah: (i) Kesulitan untuk menetapkan prioritas TPB diantara agenda pembangunan lainnya; (ii) perlunya tambahan dukungan, kapasitas, dan SDM yang kompeten; dan (iii) Ketidakcukupan anggaran (NRG4SD, 2019).

Berkenaan dengan maksud untuk melaksanakan pembangunan sambil memberikan proteksi terhadap kelestarian lingkungan, PBB mendeklarasikan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) pada Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Refleksi atas inklusi TPB pada agenda, kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan daerah dapat dinilai dari beberapa parameter antara lain: (i) tersedianya indikator-indikator TPB di tiap kabupaten/kota dan provinsi; (ii) adanya porofolio tentang kebijakan, rencana (RPJPN dan RPJPD), serta program pembangunan yang terkait dan/atau menunjang pencapaian TPB baik secara langsung atau tidak langsung; (iii) tersedianya angka-angka indeks pencapaian TPB yang baku dan disepakati oleh semua pemerintah daerah; (iv) tersedianya kerangka-kerja (framework) untuk pelaksanaan TPB pada tiap sektor pembangunan; (v) tersedianya alat bantu (tool) untuk mengukur dan menilai kinerja pencapaian TPB di daerah. Mengingat pelaksanaan dan realisasi TPB pada tahun 2030 adalah keniscayaan yang tidak dapat ditawar atau akan tertinggal dalam keterpurukan ekonomi, sosial dan lingkungan, maka keharusan tiap pemerintah daerah untuk mempersiapkan lima parameter yang telah disebutkan di atas adalah amat mendesak.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan sendiri agenda pembangunan berkelanjutan tanpa didukung penuh dan aktif oleh masyarakat. Paradigma memanfaatkan masyarakat sebagai objek pembangunan sudah lama berlalu, berganti dengan paradigma memanfaatkan masyarakat sebagai subyek, aktor, dan sekaligus modal sosial pembangunan. Belum adanya tersedianya lima parameter inklusi TPB di atas mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum siap merealisasikan TPB secara konsisten, dan hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat juga belum siap. Disinilah peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai agen perubahan (agent of change) dan agen transfer pengetahuan (agent of knowledge transfer) menjadi krusial dan bermakna.

Perguruan tinggi bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat menyusun lima parameter inklusi TPB dalam perencanaan dan program pembangunan daerah, dan pada saat yang sama menyelenggarakan pendidikan pembangunan berkelanjutan untuk menyiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pemikiran tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan lokakarya nasional untuk membuat TPB tidak sekedar menjadi isu dan agenda global, tetapi benar-benar menjadi agenda pembangunan lokal – regional

yang tercantum di dalam rencana dan program pembangunan daerah. Lokakarya dengan pelokalan TPB ini mencakup dua konten utama sentral yaitu: (i) Inklusi TPB pada semua kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah; dan (ii) Integrasi vertikal dan horisontal pada ranah kebijakan, regulasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian kinerja pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan gagasan sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka diselenggarakan lokakarya nasional dengan tema/judul: “PELOKALAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI DAERAH: Review Inklusi, Integrasi, dan Koherensi Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)”.

2. TUJUAN KEGIATAN

Maksud dari penyelenggaraan lokakarya nasional dengan tema Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan Di Daerah ini adalah untuk:

1. Membangkitkan kesadaran tentang urgensi pelokalan TPB yang diukur dan dinilai dari seberapa jauh tingkat inklusinya di dalam agenda, kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan daerah.
2. Merumuskan lima parameter inklusi TPB sebagaimana yang telah disebutkan di bagian latar belakang.
3. Berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar tentang agenda pembangunan berkelanjutan 2030 dan TPB beserta segala implikasinya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran dan kemauan aktor, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil (civil society) untuk menjadikan agenda pembangunan berkelanjutan dan TPB sebagai agenda dan muatan pembangunan lokal; mengembangkan kesiapan, kapasitas, dan kapabilitas untuk merealisasikan TPB pada tahun 2030 serta membangun ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat yang diukur dari indeks capaian good governance dan indeks capaian ketangguhan komunitas (community resilience).

3. WAKTU, LOKASI DAN PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juli 2021 melalui aplikasi zoom meeting dengan link: (<https://undip-ac-id.zoom.us/j/98153830226?pwd=RCs0THV6eGVJcGhOmjBjTGQ2cE93Zz09>) atau melalui ID: 981 5383 0226, Passcode: SPSUNDIP dengan peserta kegiatan sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- e. Lembaga pers/media (Persatuan Wartawan Indonesia, Suara Merdeka, Jawa Pos, Tribun Jateng)
- f. Lembaga swadaya masyarakat (Yayasan Bina Karta Lestari, Biota Foundation, IUCCE, Walhi dan INKINDO)
- g. Sektor privat (PT. Sritex, PT. Mangkok MAS, PT. Java Eggs Specialities (Jess) dan PT.

Sinar Centra Cipta)

- h. Dosen Magister Ilmu Lingkungan Undip
- i. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro
- j. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Katolik Soegijapranata
- k. Teknik Perencanaan Wilayah Kota Universitas Katolik Soegijapranata
- l. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Islam Sultan Agung
- m. Teknik Perencanaan Wilayah Kota Universitas Islam Sultan Agung
- n. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Sebelas Maret
- o. Teknik Perencanaan Wilayah Kota Universitas Sebelas Maret
- p. Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro
- q. Mahasiswa Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro
- r. Mahasiswa Universitas Diponegoro Mata Kuliah Sumber Daya Alamiah & Lingkungan
- s. Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah Kota

4. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang dengan mengundang pemateri dan penanggung materi yang berasal dari:

Pemateri:

- a. Mahasiswa Mata Kuliah Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan (PDPL) Program Studi Ilmu Lingkungan (MIL) Universitas Diponegoro Semarang
- b. SDGs Center Universitas Diponegoro
- c. UCLG-ASPAC
- d. Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah
- e. Koordinator Dosen Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

Penanggung:

- a. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
- b. Kepala Bappeda Kota Semarang
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Lokakarya Nasional ini dibiayai oleh Prodi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

6. AGENDA KEGIATAN

WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
08.00-08.15	Registrasi <i>join ZOOM meeting</i>	Host
08.15-08.25	Acara dimulai, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan doa	MC
08.25-08.30	Sambutan dan pembukaan	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc Wakil Dekan Sumberdaya dan Inovasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
SESI 1		
08.30-08.35	Pengantar materi	Moderator: Prof. Dr. Ir. Sri Puryono, M. P.
08.35-08.50	Materi 1: Review inklusi, integrasi, dan koherensi RPJMD dengan TPB	Pemateri I: Reza Muzzamil Jufri Mahasiswa MIL yang mewakili
08.50-09.05	Penanggap 1 Menanggapi materi dari mahasiswa	Penanggap I Drs. One Andang Wardoyo, M.Si Sekda Kabupaten Wonosobo
09.05-09.20	Penanggap 2 Menanggapi materi dari mahasiswa	Penanggap II M. Luthfi Eko Nugroho, ST.,MT. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang
09.20-09.35	Penanggap 3 Menanggapi materi dari mahasiswa	Penanggap III Drs. Edi Wahyono, M.Si. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah
09.35-09.55	Diskusi (tanya jawab)	Seluruh pemateri, penanggap, dan peserta
SESI 2		
09.55-10.00	Pengantar materi	Moderator: Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno, MSc
10.00-10.15	Materi 2: Jejaring-Kerja Lintas Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan, dan Program untuk Implementasi TPB dalam Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan	Pemateri II Dr. Drs. Amirudin, M.Si Ketua SDGs Center Universitas Diponegoro
10.15-10.30	Materi 3: Menuju Pelokalan TPB dalam Agenda Pembangunan Lokal – Regional di Indonesia	Pemateri III Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi Sekretaris Jenderal UCLG-ASPAC

10.30-10.45	Materi 4: Upaya Percepatan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh Pemerintah Daerah Terkait Lingkungan Hidup	Pemateri IV Ir. Edison Siagian, ME Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri)
10.45-11.15	Sesi Diskusi (Tanya Jawab)	Seluruh pemateri, penanggung, dan peserta
11.15-11.30	Identifikasi Indikator Lokal, Penilaian Inklusi, Koherensi, Integrasi TPB Pada Kebijakan, Rencana Dan Program Pembangunan Serta Pengelolaan Lingkungan Di Daerah	Pemateri V Dr. Lilin Budiati, S.H.,M.M.
11.30-11.35	Penutup Lokakarya	Dr. Eng. Maryono, ST, MT. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro
11.35-11.40	Foto Bersama	MC

8. MATERI KEGIATAN

Paparan dari tim review/peneliti Lokakarya Nasional oleh Mahasiswa Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang dengan tema **Review Inklusi, Integrasi, dan Koherensi antara Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)** serta tim pakar Lokakarya Nasional oleh tim pengajar mata kuliah Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Magister Ilmu Lingkungan dengan tema **Identifikasi Indikator Lokal, Penilaian Inklusi, Koherensi, Integrasi pada Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah**

PELOKALAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI DAERAH

ABSTRAK

Terdapat permasalahan serius dalam proses pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jawa Tengah yaitu: (1) Perumusan indikator lokal 28,41% tidak tersedia data, dan (2) Kriteria penilaian pencapaian TPB berubah-ubah atau tidak baku. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pelokalan dan implementasi TPB tidak menggunakan *instrumen, tool* dan indikator yang tepat. Bertolak dari fakta tersebut dilakukan review/penelitian pelokalan TPB pada kebijakan, rencana dan program pengelolaan lingkungan di daerah. Review ini bertujuan 1) Membangun kesadaran dan kemauan aktor, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil (*civil society*) untuk menjadikan agenda pembangunan berkelanjutan dan TPB sebagai agenda dan muatan pembangunan lokal, 2) Mengembangkan kesiapan, kapasitas, dan kapabilitas untuk merealisasikan TPB pada tahun 2030, 3) Membangun ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat diukur dari indeks capaian *good governance* dan ketangguhan *komunitas (community resilience)*. Review ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif serta pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis *Importance- Performance Analysis (IPA)*. *IPA* dilakukan dengan membandingkan rerata skor kondisi eksisting dengan rerata skor kondisi diharapkan dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Hasil rekapitulasi pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan parameter inklusi, integrasi vertikal dan horizontal serta koherensi kebijakan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah didapat skor rerata pelokalan sebesar 72,22%, Kota Semarang dengan skor 60,53% dan Kabupaten Wonosobo dengan skor 48,47%. Berdasarkan skor rerata pelokalan dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pelokalan TPB di Provinsi Jawa Tengah paling tinggi jika dibandingkan Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo. Namun capaian pelokalan pada tiga wilayah tersebut masih dibawah kondisi yang diharapkan sehingga perlu upaya percepatan pelokalan dan implementasi TPB melalui penggunaan *instrumen, tool* dan *framework* yang tepat.

Keywords: Pelokalan, TPB, Instrumen, Tool, Framework

1. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* dideklarasikan pada Sidang Umum PBB di New York untuk menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) pada September 2015. Terdapat Agenda Pembangunan Global berupa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target mencakup tiga dimensi yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang dan terpadu

yang diagendakan dapat dicapai diseluruh dunia pada tahun 2030 (RAD Provinsi Jawa Tengah 2019-2023). Pada kawasan regional Asia-Pasific konsep pelokalan TPB adalah sangat relevan. Negara-negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia, mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi tinggi dan cepat. Hal ini menimbulkan tekanan berat pada kapasitas komunitas lokal terutama pada aspek-aspek perencanaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan. Di sisi lain, konsentrasi populasi, infrastruktur, pelayanan, inovasi, produksi, dan aglomerasi di wilayah perkotaan, adalah potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk membuat platform pembangunan daerah yang menunjang pencapaian TPB pada 2030 (Stepputat et al., 2016). Peran pembangunan daerah (lokal – regional atau kota – kabupaten – provinsi) adalah krusial dan secara kumulatif menentukan keberhasilan pemerintah pusat dalam merealisasikan TPB. Upaya percepatan dalam melokalkan dan mengimplementasikan TPB dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dan target serta membangun pemerintahan yang efektif.

Dasar hukum perencanaan pembangunan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: “Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya. Perencanaan TPB/SDGs di Indonesia terdiri dari 60 indikator yang tercantum di dalam Road Map TPB/SDGs, 118 target dan 319 indikator dalam RAN TPB/SDGs (Bappenas, 2018).

Peran pembangunan daerah (lokal – regional atau kota – kabupaten – provinsi) adalah krusial dan secara kumulatif menentukan keberhasilan pemerintah pusat dalam merealisasikan TPB. Dibutuhkan inisiatif kebijakan baik di level provinsi maupun kabupaten kota, kerangka regulasi dan kelembagaan untuk menjadikan TPB sebagai muatan lokal dalam agenda, perencanaan dan program pembangunan daerah serta pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan yang menjadi pangkal persoalan dalam merealisasikan TPB pada tahun 2030 serta menjaga daya dukung lingkungan yang dapat terdegradasi akibat pertumbuhan kota yang disebabkan dari adanya kapitalisasi, pemekaran regional, urbanisasi dan/atau migrasi desa – kota, aglomerasi, dan sebagainya.

Implementasi TPB untuk merealisasikan agenda 2030 membutuhkan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat secara konsisten. Namun kondisi saat ini menunjukkan belum tersedianya lima parameter inklusi TPB yaitu: (i) tersedianya indikator-indikator TPB di tiap kabupaten/kota dan provinsi; (ii) adanya portofolio tentang kebijakan, rencana (RPJPN dan RPJPD), serta program pembangunan yang terkait dan/atau menunjang pencapaian TPB baik secara langsung atau tidak langsung; (iii) tersedianya angka-angka indeks pencapaian TPB yang baku dan disepakati oleh semua pemerintah daerah; (iv) tersedianya kerangka-kerja (*framework*) untuk pelaksanaan TPB pada tiap sektor pembangunan; (v) tersedianya alat bantu (*tool*) untuk mengukur dan menilai kinerja pencapaian TPB di daerah.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penting adanya penelitian mengenai: “Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan

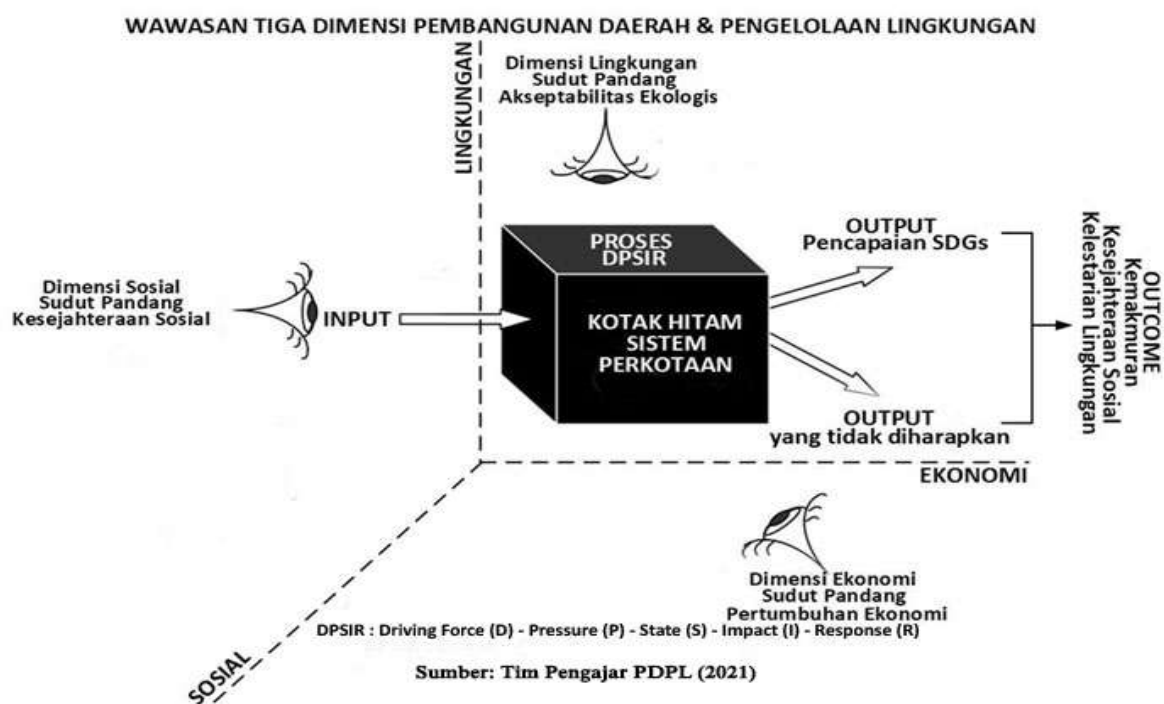
Di Daerah melalui Review dan Identifikasi Indikator Lokal, Penilaian Inklusi, Koherensi, Integrasi pada Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan dalam Pengelolaan Lingkungan

a. Pendekatan Sistem

Pada prinsipnya, diperlukan cara pandang dan pendekatan tertentu dalam mengamati, menganalisis, dan menemukan solusi atas problem aktual yang dihadapi. Manusia di ruang sosial berinteraksi dengan ekosistem membentuk suatu sistem yang disebut “sistem sosio-ekologis” yang terdiri dari tiga komponen: (i) infrastruktur-teknikal; (ii) ekosistem (lingkungan); dan (iii) sosial (manusia). Di sisi lain, kehidupan manusia dari waktu ke waktu dalam peradaban yang selalu dipengaruhi oleh teknologi sehingga membentuk suatu sistem yang disebut “sistem sosio-teknikal”. Berkenaan dengan hal itu, maka diperlukan cara “pendekatan sistem” dalam mengamati dan menganalisis problem lingkungan yang bersifat multi dimensi, kompleks, dan mengandung banyak hal yang bertentangan (paradoks). Folke (2006) menyatakan bahwa “memandang lingkungan bukan sebagai sistem dan kemudian mengelolanya secara parsial dan terpisah-pisah adalah kekeliruan mendasar yang mengarah pada kegagalan sistem. Terkait dengan hal ini, salah satu prinsip dalam deklarasi PBB tentang pembangunan berkelanjutan adalah “menerapkan cara pandang holistik, pendekatan sistem, dan keterpaduan (integrasi) dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan”. Terkait dengan cara pandang holistik dan pendekatan sistem sebagaimana dimaksud dalam deklarasi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, maka diperlukan wawasan tiga dimensi dalam melaksanakan Pembangunan Daerah dan pengelolaan Lingkungan (PDPL) sebagai berikut:

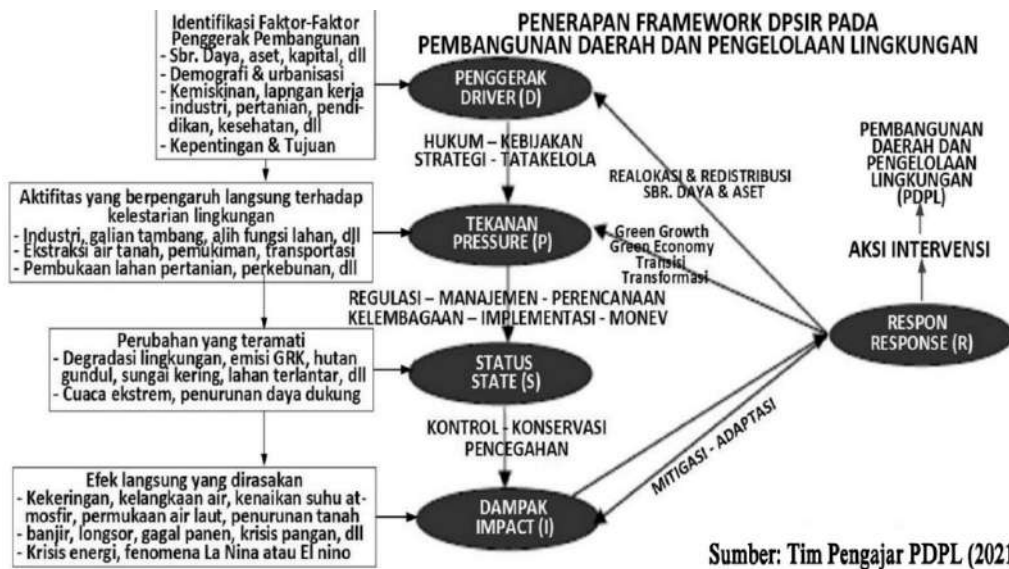


Gambar 1. Wawasan Tiga Dimensi Pembangunan Daerah & Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pendekatan Sistem dan Pendekatan DPSIR

b. Pendekatan Operasional: Driving Force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)

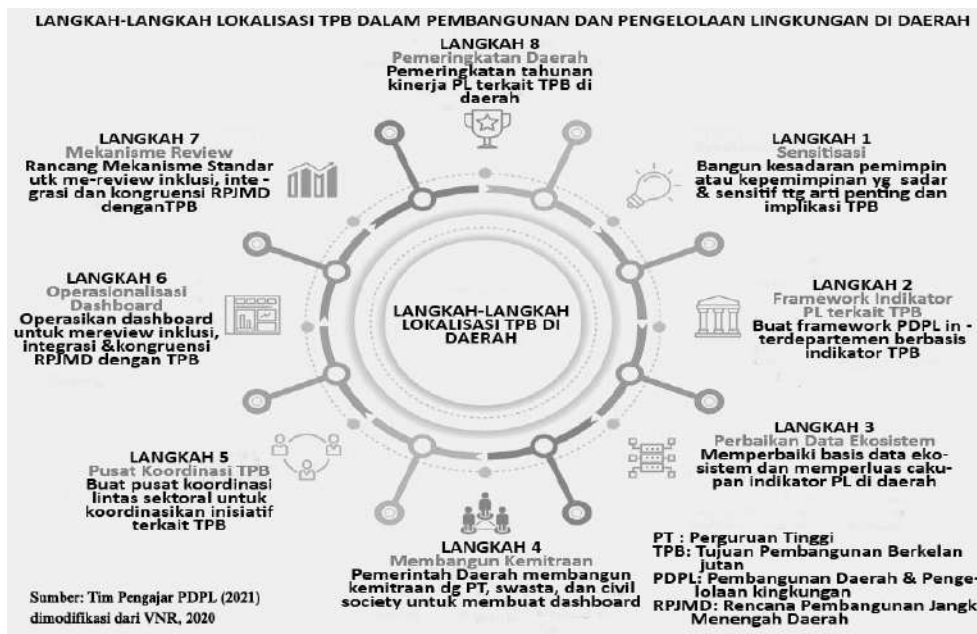
Pada tataran operasional, diperlukan cara pendekatan teknis dalam mengamati, menganalisis, dan menemukan solusi atas suatu problem. Terkait dengan problem lingkungan, European Environment Agency (EEA) pada tahun 1997 memulai penerapan pendekatan DPSIR untuk menangani problem lingkungan. Pada saat ini, pendekatan DPSIR telah diadopsi di seluruh dunia karena tingkat kedayagunaan, kepraktisan, serta kemanfaatannya yang tinggi.

Aplikasi framewok pendekatan DPSIR untuk menangani problem lingkungan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2. Aplikasi Framework DPSIR Pada Problem Lingkungan

c. Framework Langkah-Langkah Pelokalan TPB dalam Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan (PDPL)

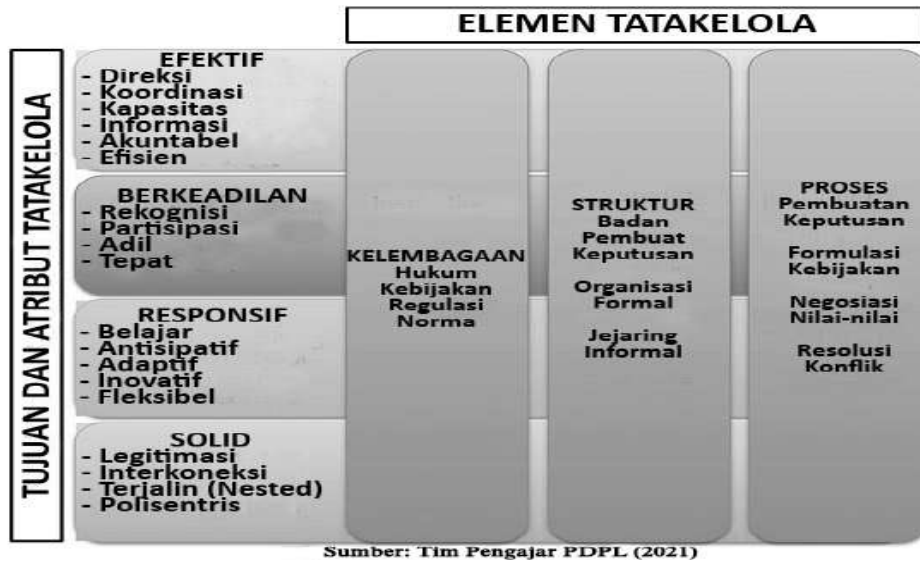


Gambar 3. Langkah- langkah Pelokalan TPB

2.2 Framework Pengelolaan Lingkungan

a. Framework Tatakelola Lingkungan

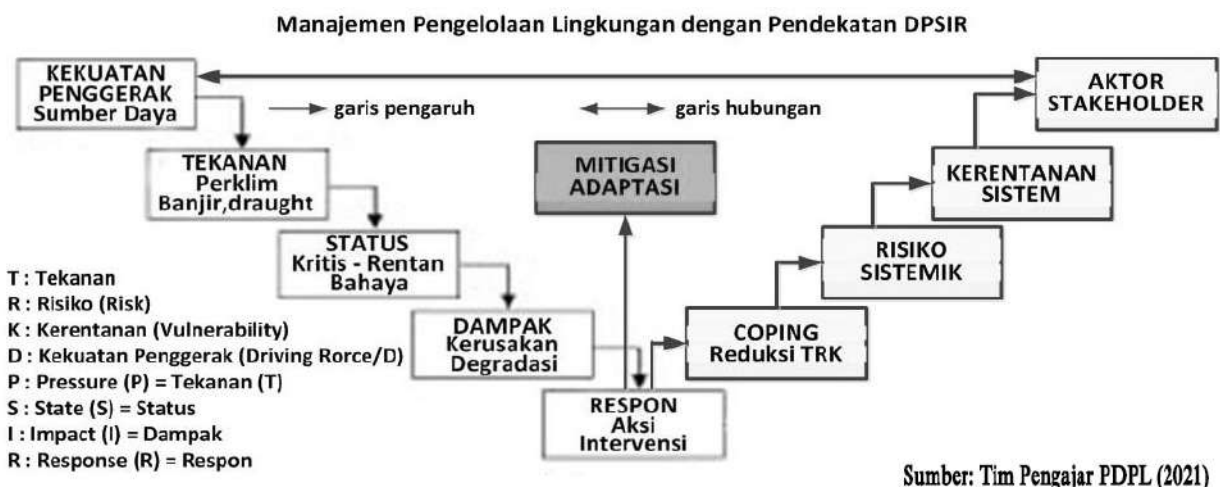
Tatakelola pada konteks pengelolaan lingkungan merujuk pada pengertian “kapasitas dan kapabilitas aktor (pemerintah) bersama dengan stakeholders untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan. Tatakelola menyangkut banyak ranah kegiatan mulai dari kebijakan, regulasi, manajemen, dan operasional. Pengelolaan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan memerlukan framework sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 4. Framework Tatakelola Lingkungan

b. Framework Manajemen Pengelolaan Lingkungan dengan Pendekatan DPSIR

Upaya pengelolaan lingkungan pada ranah meso memerlukan kerangka-kerja (*framework*) manajemen untuk mengatasi problem melalui upaya: (i) “Coping” yang tujuannya adalah mengurangi (reduksi) Tekanan (T), Risiko (R), dan Kerentanan (K) agar status (S) lingkungan yang rusak dapat diperbaiki secara berkelanjutan; dan (ii) Mitigasi dampak dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Framework manajemen pengelolaan lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut:

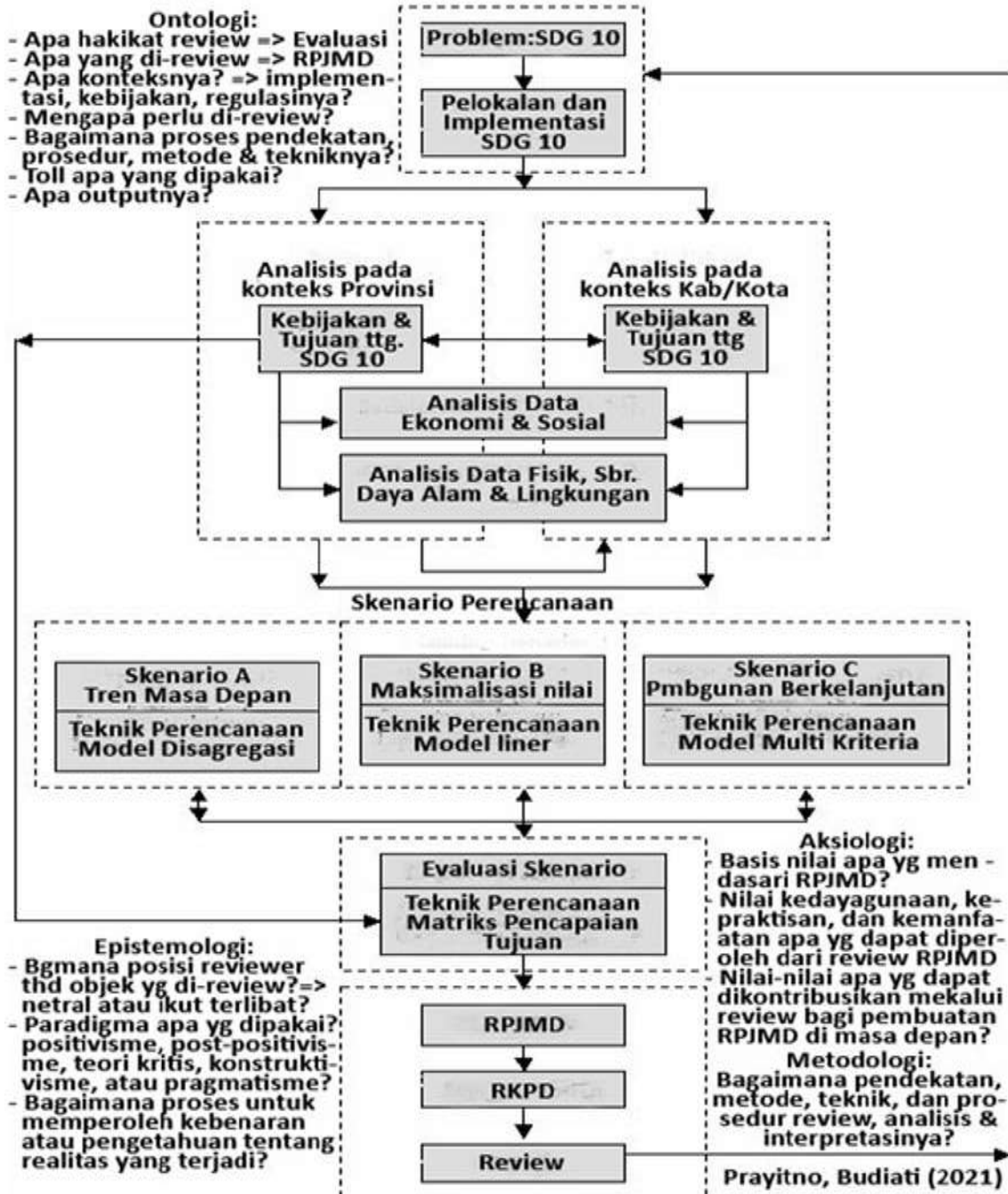


Gambar 5. Framework Pengelolaan Lingkungan Dengan Pendekatan DPSIR

3. METODE REVIEW/PENELITIAN

BAGAIMANA METODOLOGI PELAKSANAAN REVIEW RPJMD?

Contoh metodologi pelaksanaan review pada SDG/TPB 10



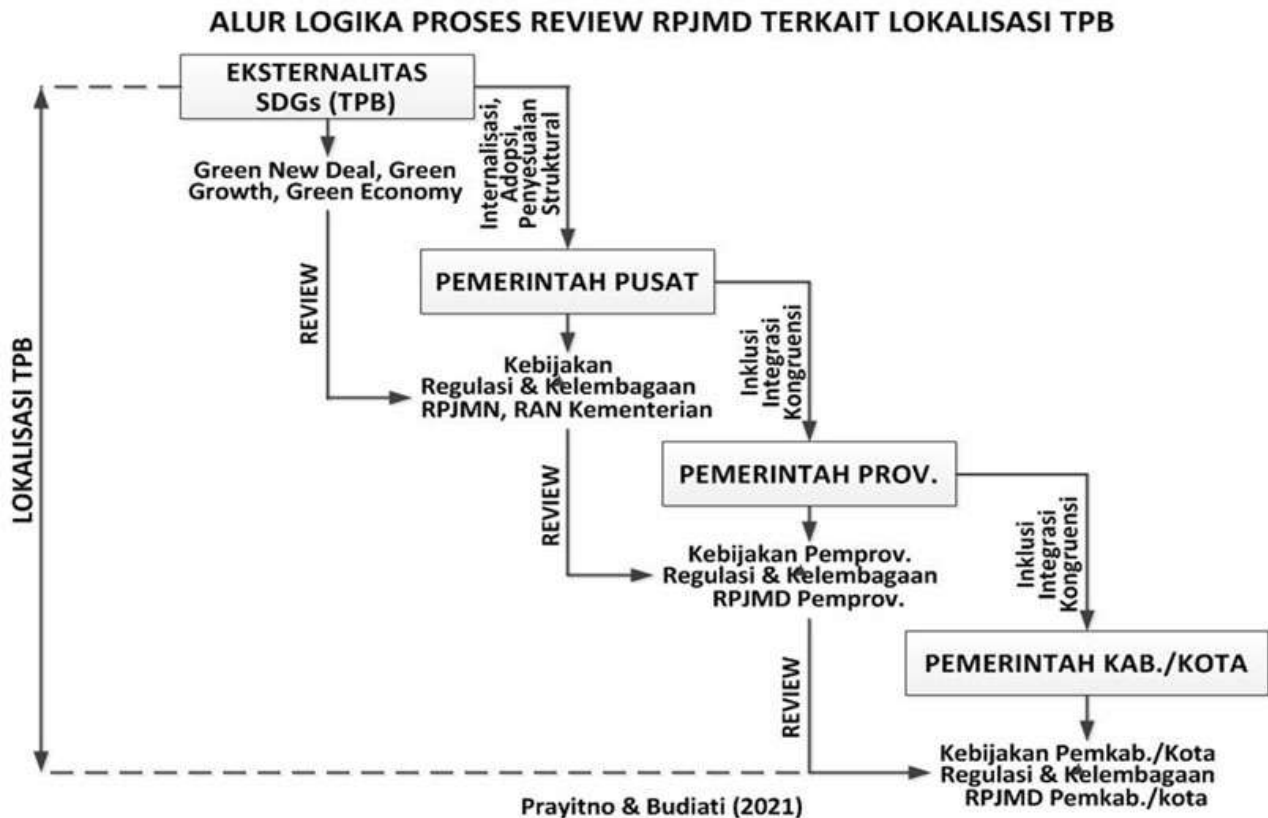
Gambar 6. Metode Review/ Penelitian Pelokalan TPB

Penelitian/review dalam identifikasi Indikator Lokal, Penilaian Inklusi, Koherensi, Integrasi pada Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau campuran. Pendekatan kuantitatif di laksanakan dengan survey dan hasilnya dianalisis dengan teknik *Importance- Performance Analysis (IPA)*.

Sedangkan pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan cara studi dokumen dan wawancara.

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data Primer berupa hasil kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi beberapa dokumen antara lain: Roadmap TPB, RPJMN/RAN TPB, RPJMD, RAD, RKPD, dan Laporan Pencapaian TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

APA LANGKAH AWAL YANG HARUS DILAKUKAN? Melakukan identifikasi & penilaian atas implementasi SDG melalui review RPJMD dalam rangka merumuskan indikator lokal



Gambar 7. Alur Logika Proses Review Dokumen

4. HASIL REVIEW/PENELITIAN

4.1 Hasil Review Inklusi, Integrasi, dan Koherensi antara Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara Kualitatif

Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk meneliti tentang sistem tata kelola dan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi TPB/SDGs di tingkat internasional, nasional dan lokal. Namun mengenai penelitian yang menganalisis struktur serta kinerja nasional dan lokal tentang sistem tata kelola TPB/SDGs di berbagai negara masih sangat sedikit (Morita et. al., 2019). Pada penelitian ini melakukan analisis mengenai Inklusi, Integrasi dan Koherensi antara Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 6, 10, 11 dan 13. Berikut ini hasil analisis dalam penelitian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TPB	KEBIJAKAN	INDIKATOR LOKAL	INKLUSI			KOHERENSI KEBIJAKAN			INTEGRASI			SIMPULAN
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	
6	6.1.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. 6.1.2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	6.1.1 Pencapaian akses air minum layak 100% dan akses air minum aman 15% 6.1.2 Layanan sanitasi yang berkelanjutan.	+4	+3	+2	+4	+3	+2	+4	+3	+2	TPB telah menjadi isu dan agenda pembangunan lokal di daerah. Tiap-tiap TPB sudah ada indikator lokalnya di daerah Klasifikasi tingkat inklusi, integrasi, dan koherensi terkait TPB pada kebijakan, rencana, program, dan proyek di daerah adalah sebagai berikut: Provinsi Jawa Tengah: Tinggi Kota Semarang: Cukup Tinggi (sedang) Kabupaten Wonosobo: Rendah
10	Mengurangi ketimpangan dengan Koefisien Gini	Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.	+4	+3	+2	+4	+3	+2	+4	+3	+2	
11	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan permukiman layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	+4	+3	+2	+4	+3	+2	+4	+3	+2	
13	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.	Penurunan emisi dan intensitas emisi.	+4	+3	+2	+4	+3	+2	+4	+3	+2	

Tabel 1. Hasil Review Inklusi, Integrasi dan Koherensi

Keterangan:

+1: sangat rendah/ tidak ada +2: rendah +3: cukup +4: tinggi +5: sangat tinggi
A: Provinsi Jawa Tengah B: Kota Semarang C: Kabupaten Wonosobo

REFLEKSI

1. TPB telah terinklusi menjadi agenda pembangunan lokal di daerah meskipun tingkat inklusinya tidak merata. Provinsi Jawa Tengah tingkat inklusinya tinggi, sementara Kota Semarang sedang atau cukup tinggi, dan Kabupaten Wonosobo rendah. Hal ini mencerminkan realitas bahwa tingkat inklusi berkaitan atau bergantung dengan sumber daya, kapasitas, dan kapabilitas pemerintah daerah dalam mentranlasikan dan merealisasikan TPB menjadi kebijakan, rencana, dan program pembangunan di daerah.
2. Setiap TPB sudah ada indikatornya meskipun jenis dan jumlahnya bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini berkaitan dengan sumber pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas pemahaman dan eksekusi, ketersediaan dan kualitas data atau informasi serta relevansinya dengan TPB.

Koherensi kebijakan, integrasi vertikal dan/atau horisontal masih menjadi problem yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena cukup banyak kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang belum sesuai dengan TPB.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi eksisting implementasi TPB di daerah belum dapat menjamin kepastian tentang realisasi TPB pada tahun 2030.

4.2 Hasil Review Inklusi, Koherensi, Integrasi pada Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah Secara Kuantitatif

Lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB/SDGs diidentifikasi kemudian dinilai Inklusi, Koherensi, Integrasi pada Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan di Daerah dengan teknik analisis kuantitatif *Importance- Performance Analysis (IPA)*. IPA dilakukan dengan membandingkan rerata skor Kondisi Eksisting (KE) dengan rerata skor Kondisi Diharapkan (KD), dihitung menggunakan rumus dan aplikasi SPSS. Instrumen penelitian adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1 s.d 5. Populasi penelitian adalah mahasiswa S2 Universitas Diponegoro. Jumlah sampel (n)= 30 responden untuk masing-masing wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo.

4.2.1. Provinsi Jawa Tengah

a. Analisis Tingkat Kesesuaian

Inklusi

Berikut adalah tingkat kesesuaian antara Kondisi Eksisting (KE) dengan Kondisi Diharapkan (KD):

Tabel 2. Hasil Tingkat Kesesuaian Inklusi Provinsi Jawa Tengah

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KD)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Inklusi TPB	1	Visi merealisasikan TPB di daerah	85	2.83*	120	4.00	70.83%
	2	Inisiatif melokalkan TPB	88	2.93	126	4.20	69.84%
	3	Membuat kebijakan implementasi TPB di daerah	92	3.07	127	4.23	72.44%
	4	Menetapkan indikator TPB lokal	89	2.97	127	4.23	70.08%

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KD)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)	
Inklusi TPB	5	Menyiapkan instrumen implementasi TPB di daerah	86	2.87	130	4.33	66.15%	
	6	Kapasitas untuk mengimplementasikan TPB	89	2.97	128	4.27	69.53%	
	7	Aktor & stakeholder terkait mempunyai pengetahuan, sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur	90	3.00	129	4.30	69.77%	
	8	Strategi pelokalan dan implementasi TPB	92	3.07	131	4.37	70.23%	
	9	Keterlibatan organisasi kunci dalam pelokalan dan implementasi TPB	93	3.10	125	4.17	74.40%	
	10	Aplikasi TPB pada program & proyek pembangunan	93	3.10	118	3.93	78.81%	
	Rerata			90	3.00	126.50	4.22	71.22%
	Total			900		1265		

Berdasarkan tabel diatas tingkat kesesuaian (inklusi) antara KE dengan KD di Provinsi Jawa Tengah adalah 71,22%. Namun rerata skor kinerja untuk item pernyataan (1, 2, 4, 5 dan 6) memiliki skor dibawah 3. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelokalan dan implementasi TPB lambat. Sehingga perlu dibuat instrumen, *tool* dan framework yang tepat. Perlu dibangun visi, kebijakan dan kapasitas untuk mengimplementasikan TPB.

Integrasi Vertikal dan Horisontal

Berikut adalah hasil analisis IPA tingkat kesesuaian antara Kondisi Eksisting (KE) dengan Kondisi Diharapkan (KD) pada variabel integrasi vertikal dan horizontal TPB:

Tabel 3. Hasil Tingkat Kesesuaian Integrasi Vertikal dan Horisontal provinsi Jawa Tengah

Variabel	No	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)	
Integrasi TPB (Vertikal)	11	RPJMN	88	2.93	124	4.13	70.97%	
	12	RPJMD Provinsi	88	2.93	120	4.00	73.33%	
	13	RPJMD Kabupaten/Kota	91	3.03	118	3.93	77.12%	
	Rerata			88.33	2.94	118.33	3.94	74.65%
	Total			265		355		

Variabel	No	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Integrasi TPB (Horisontal)	14	Pengenalan/Rekognisi	86	2.87	117	3.90	73.50%
	15	Adopsi	83	2.77*	119	3.97	69.75%
	16	Adaptasi	85	2.83	124	4.13	68.55%
	17	Difusi	88	2.93	117	3.90	75.21%
	18	Transformasi	89	2.97	123	4.10	72.36%
	Rerata		86.60	2.89	121.60	4.05	71.25%
	Total		433		608		

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa tingkat kesesuaian antara KE dengan KD untuk integrasi vertikal dan horizontal adalah tinggi dengan skor lebih dari 70%, namun rerata kinerja atau kondisi eksisting kurang dari 3. Integrasi dengan RPJMN perlu ditingkatkan agar program dari pusat dapat ditranslasikan ke kab/kota. Untuk item pernyataan 14, 15 dan 16 perlu diintensifkan melalui jejaring komunikasi dan kemitraan.

Koherensi

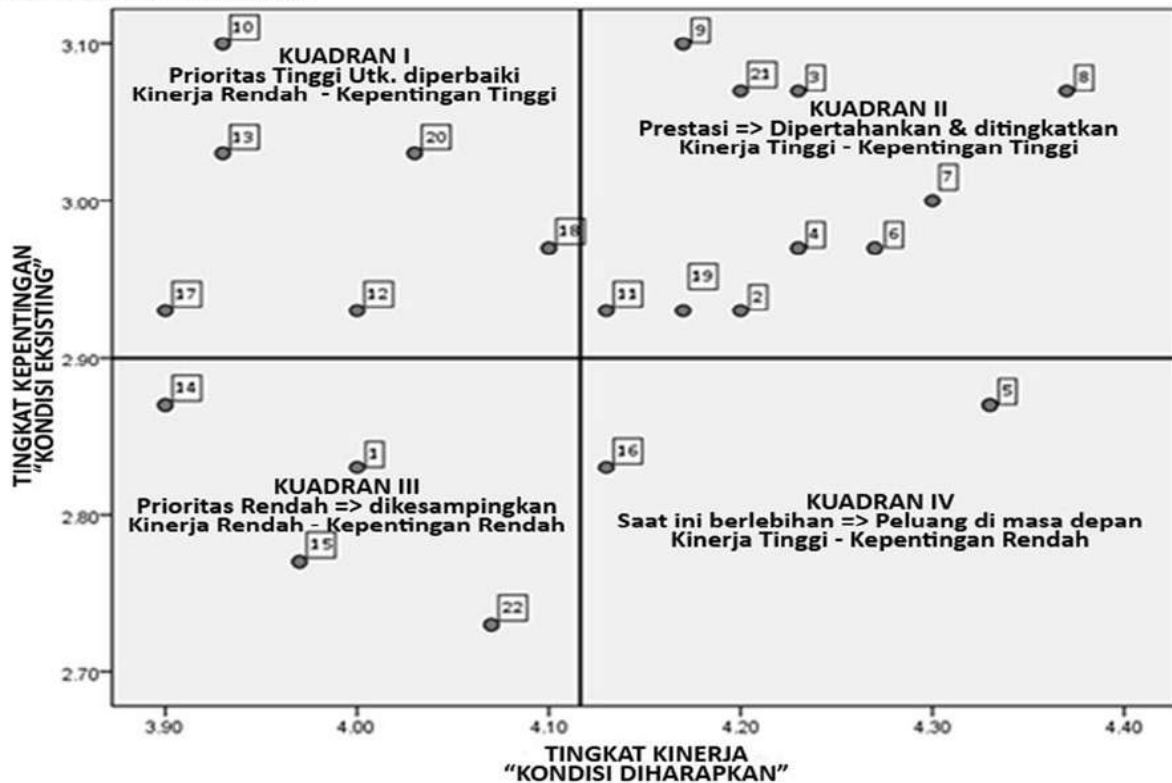
Tabel 4. Hasil Tingkat Kesesuaian Koherensi Provinsi Jawa Tengah

Variabel	No	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Koherensi	19	Koherensi kebijakan pada satu wilayah administratif	88	2.93	125	4.17	70.40%
	20	Koherensi kebijakan antar level administratif	91	3.03	121	4.03	75.21%
	21	Koherensi kebijakan antar wilayah administratif	92	3.07	126	4.20	73.02%
	22	Koherensi kebijakan masa kini dan masa depan	82	2.73	122	4.07	67.21%
	Rerata		553.25	2.95	771.50	4.10	71.78%
Total		2213		3086			

Kesesuaian anantara Kondisi Eksisting dengan Kondisi Diharapkan untuk koherensi kebijakan terkait TPB adalah 71,78% tergolong tinggi, namun skor keherensi untuk item 19 dan 22 adalah kurang dari 3 atau dikatakan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat koherensi di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi tantangan pokok pelokalan dan/atau implementasi TPB di daerah. Kebijakan pada umumnya masih berjangka pendek, temporer dan kurang koheren dengan kebijakan yang berorientasi dengan masa depan.

b. Analisis Kuadran

HASIL ANALISIS IPA WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH 2. Analisis Kuadran



Gambar 8. Kuadran Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar kuadran diatas dapat diinterpretasikan bahwa:

Kuadran I:

Tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya rendah. Prioritas utama untuk diperbaiki kinerjanya. Item pernyataan 10, aplikasi TPB pada program dan proyek pembangunan dengan implementasi TPB yang masih kurang. Perlu instrumen tatakelola yang lebih baik dan skenario perencanaan yang lebih komprehensif. Item 12, pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Perencanaan kurang terintegrasi secara vertikal sehingga perlu adanya forum koordinasi. Item 13, merupakan RPJMD Kota yang memiliki integrasi vertikal cukup tinggi, dapat ditingkatkan dengan memperkuat koordinasi. Item 17, TPB belum terdifusi secara merata pada semua instansi dan lembaga sosial. Dibutuhkan upaya diseminasi, sosialisasi dan promosi TPB pada semua lapisan masyarakat untuk membangkitkan kesadaran. Item 18, inklusi TPB belum mampu menimbulkan transformasi sosial dan kelembagaan. Dapat diatasi dengan pembuatan gerakan sosial untuk pelokalan dan implementasi TPB. Item 20, koherensi kebijakan antar level administratif masih kurang, perlu adanya jejaring kebijakan.

Kuadran II:

Tingkat kepentingan tinggi, kinerja yang dilakukan tinggi. Dengan data penyebaran Item 3, membuat kebijakan implementasi TPB dengan skenario perencanaan yang holistik, terpadu, berorientasi masa depan dan berkelanjutan. Item 6, kapasitas implementasi TPB tinggi serta perlu dukungan dengan framework operasional yang matang. Item 7, pengetahuan sumberdaya dan

infrastruktur dari aktor dan stakeholder memiliki kinerja yang tinggi . Untuk mengoptimalkan kinerja perlu skenario relokasi dan redistribusi sumberdaya , pengetahuan dan skill yang efektif dan merata. Item 8, Strategi pelokalan dan implementasi perlu dukungan konsep operasional yang integratif dan holistik. Item 9, keterlibatan organisasi kunci memiliki kinerja yang tinggi namun perlu dioptimalkan. Item 21, koherensi kebijakan antar wilayah administrasi dapat dioptimalkan dengan menciptakan aglomerasi pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah.

Kuadran II:

Tingkat kepentingan masih rendah dan kinerja rendah menjadikan prioritas rendah untuk di intervensi. Dengan persebaran data Item 1,14, 15 dan 22 dianggap tidak penting atau bukan prioritas sehingga kinerja rendah, aksi dapat dilakukan tanpa visi, pengenalan, adopsi, dan orientasi kebijakan cukup pada masa kini yang sudah pasti.

Kuadran IV:

Tingkat kepentingan rendah namun kinerja tinggi dapat menjadi peluang di masa depan. Data persebaran Item 5 , menyiapkan instrumen implementasi TPB dengan kinerja yang tinggi dianggap berlebihan pada saat ini. Hal ini akan menjadi peluang untuk dikembangkan percepatan implementasi TPB. Item 16, Adaptasi dan kinerja yang tinggi menjadi peluang untuk mengembangkan percepatan difusi dan transformasi dalam rangka percepatan implementasi TPB

4.2.2 Hasil Analisis IPA Kota Semarang

a. Analisis Tingkat Kesesuaian

Inklusi

Tabel 5. Hasil Tingkat Kesesuaian Inklusi Kota Semarang

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Inklusi TPB	1	Visi merealisasikan TPB di daerah	74	2.47	118	3.93	62.71%
	2	Inisiatif melokalkan TPB	75	2.50	133	4.43	56.39%
	3	Membuat kebijakan implementasi TPB di daerah	77	2.57	130	4.33	59.23%
	4	Menetapkan indikator TPB lokal	86	2.87	139	4.63	61.87%
	5	Menyiapkan instrumen implementasi TPB di daerah	87	2.90	138	4.60	63.04%
	6	Kapasitas untuk mengimplementasikan TPB	79	2.63	131	4.37	60.31%
	7	Aktor & stakeholder terkait mempunyai pengetahuan, sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur	78	2.60	135	4.50	57.78%
	8	Strategi pelokalan dan implementasi TPB	82	2.73	136	4.53	60.29%

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Inklusi TPB	9	Keterlibatan organisasi kunci dalam pelokalan dan implementasi TPB	85	2.83	129	4.30	65.89%
	10	Aplikasi TPB pada program & proyek pembangunan	79	2.63	132	4.40	59.85%
	Rerata		81.10	2.70	133.60	4.45	60.71%
	Total		811		1336		

Berdasarkan tabel diatas rerata tingkat kesesuaian antara KE dan KD untuk parameter inklusi TPB adalah cukup tinggi yaitu 60,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa TPB sudah menjadi agenda lokal Kota Semarang. Item 1, 2, dan 3 memiliki skor rerata rendah, indikasi bahwa tingkat inklusinya tidak adekuat. Sehingga perlu peningatan dan percepatan dengan instrumen yang efektif. Item 6, 7 dan 10 memiliki skor rerata yang rendah sehing perlu adanya upaya peningkatan dan percepatan instrumen yang efektif.

Integrasi Vertikal dan Integrasi Horizontal

Tabel 6. Hasil Tingkat Kesesuaian Integrasi Vertikal dan Horizontal Kota Semarang

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Integrasi TPB (Vertikal)	11	RPJMN	83	2.77	133	4.43	62.41%
	12	R P J M D Provinsi	78	2.60	130	4.33	60.00%
	13	RPJMD Kabupaten/Kota	82	2.73	128	4.27	64.06%
	Rerata		80.33	2.68	129.33	4.31	62.12%
	Total		241		388		
Integrasi TPB (Horisontal)	14	Pengenalan/Re-kognisi	81	2.70	130	4.33	62.31%
	15	Adopsi	81	2.70	131	4.37	61.83%
	16	Adaptasi	72	2.40	134	4.47	53.73%
	17	Difusi	80	2.67	135	4.50	59.26%
	18	Transformasi	83	2.77	139	4.63	59.71%
	Rerata		79.20	2.64	135.20	4.51	58.59%
Total		396		676			

Hasil analisis IPA pada tingkat kesesuaian pada paramater integrasi vertikal dan horizontal memiliki rerata yang cukup tinggi yaitu 62,12% dan 58,59%. Integrasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah ternyata lebih sulit bila dibandingkan dengan RPJMN. Hal ini mengindikasikan untuk perlunya meningkatkan forum kebijakan, koordinasi, perencanaan dan program. Kendala pada parameter integrasi horizontal adalah pada aspek adaptasi TPB dengan kebijakan dan perencanaan lokal. Indikasi dari kondisi tersebut adalah perlunya instrumen, tool dan framework pelokalan dan implementasi TPB.

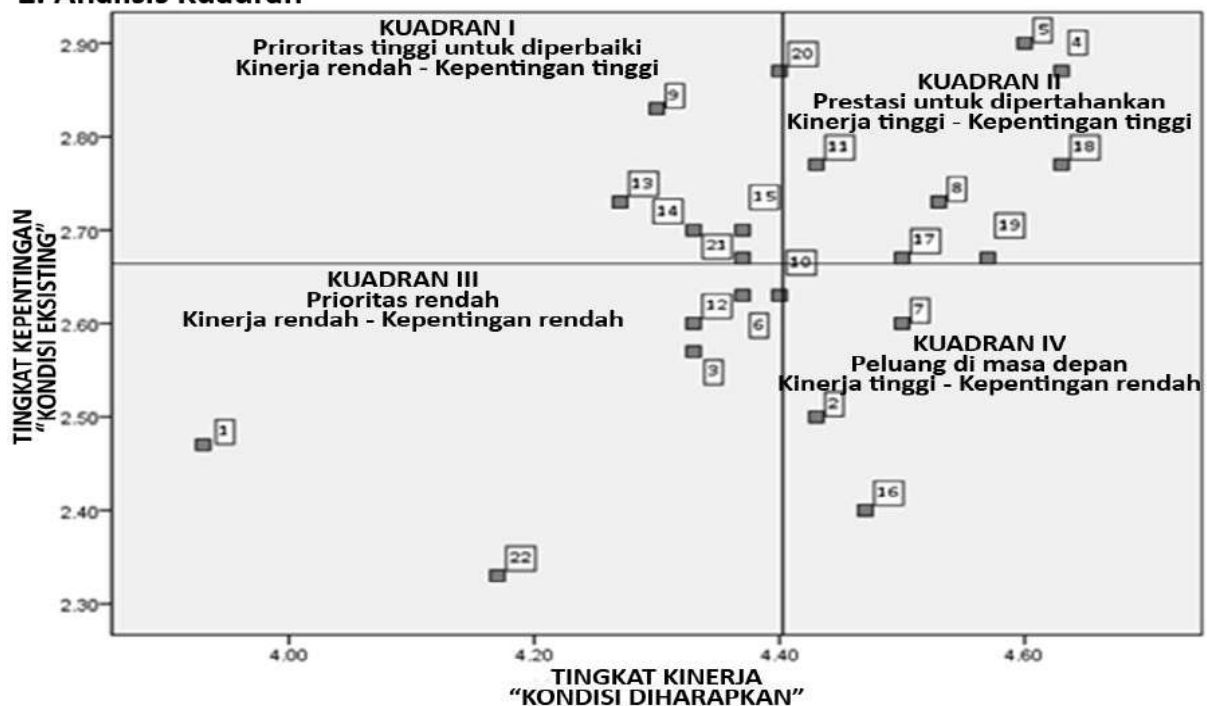
Koherensi

Tabel 7. Hasil Tingkat Kesesuaian Koherensi Kota Semarang

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Koherensi	19	Koherensi kebijakan pada satu wilayah administratif	80	2.67	137	4.57	58.39%
	20	Koherensi kebijakan antar level administratif	86	2.87	132	4.40	65.15%
	21	Koherensi kebijakan antar wilayah administratif	80	2.67	131	4.37	61.07%
	22	Koherensi kebijakan masa kini dan masa depan	70	2.33	125	4.17	56.00%
	Rerata		498.50	2.63	823.50	4.33	60.68%
Total		1994		3294			

Hasil analisis IPA pada tingkat kesesuaian antara KE dan KD pada parameter koherensi memiliki rerata cukup tinggi yaitu 60,68%. Secara umum kebijakan Pemerintah Kota Semarang adalah cukup koheren, namun perlu ditingkatkan lagi karena rerata skor KD relatif masih rendah yaitu 2,63. Item 22 perlu perhatian khusus karena skor yang paling rendah jika dibandingkan dengan item yang lain yaitu 2,33. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Kota Semarang berjangka pendekatau menengah dan belum berorientasi ke masa depan. Sehingga perlu dikembangkan visi, tujuan dan sasaran masa depan yang efektif.

HASIL ANALISIS IPA WILAYAH KOTA SEMARANG 2. Analisis Kuadran



Gambar 9. Kuadran Kota Semarang

Analisis Kuadran

Hasil analisis kuadran wilayah Kota Semarang, secara umum ekspektasi kinerja Kota Semarang dalam pelokalan dan implementasi TPB lebih besar dibandingkan dengan ekspektasi Provinsi Jawa Tengah. Sumbu vertikal Kota Semarang pada skala 4,40 sedangkan Provinsi Jawa Tengah pada skala 4,10. Indikasi dari nilai tersebut adalah gejala disagregasi implementasi TPB pada komponen dan elemen spesifik yang menjadi karakteristik lokal kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah menunjukkan gejala aglomerasi karena merupakan komposit (gabungan) dari indikator lokal berbagai kota/kabupaten di wilayahnya.

Prioritas utama pelokalan dan implementasi TPB karena kinerja yang masih rendah adalah pada:

1. Item 9: Keterlibatan organisasi kunci, kemitraan tiga poros yaitu public- private- people
2. Item 13: Pada dokumen RPJMD, perlu skenario perencanaan hibrid melalui kombinasi 3 skenario.
3. Item 14: Rekognisi, dengan pengenalan TPB perlu digalakan melalui diseminasi, sosialisasi dan promosi agar lebih cepat timbul kesadaran tentang pentingnya pelokalan dan implementasi TPB.
4. Item 15: Adopsi TPB perlu diupayakan lebih intensif untuk mempercepat implementasi TPB.
5. Item 20: Koherensi kebijakan antar level administrasi, koherensi kebijakan lintas level administrasi perlu diintensifkan dengan membangun jejaring kebijakan.
6. Item 21: Koherensi kebijakan antar wilayah administrasi, koherensi kebijakan lintas wilayah administrasi perlu dibangun dengan membentuk jejaring kebijakan dan forum kolaborasi.

4.2.3 Hasil Analisis IPA Kabupaten Wonosobo

a. Analisis Tingkat Kesesuaian

Inklusi

Tabel 8. Hasil Tingkat Kesesuaian Inklusi Kabupaten Wonosobo

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Inklusi TPB	1	Visi merealisasikan TPB di daerah	57	1.90	116	3.87	49.14%
	2	Inisiatif melokalkan TPB	60	2.00	129	4.30	46.51%
	3	Membuat kebijakan implementasi TPB di daerah	55	1.83	122	4.07	45.08%
	4	Menetapkan indikator TPB lokal	54	1.80*	131	4.37	41.22%
	5	Menyiapkan instrumen implementasi TPB di daerah	66	2.20	122	4.07	54.10%
	6	Kapasitas untuk mengimplementasikan TPB	58	1.93	121	4.03	47.93%
	7	Aktor & stakeholder terkait mampu-nyai pengetahuan, sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur	61	2.03	121	4.03	50.41%

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Inklusi TPB	8	Strategi pelokalan dan implementasi TPB	57	1.90	124	4.13	45.97%
	9	Keterlibatan organisasi kunci dalam pelokalan dan implementasi TPB	60	2.00	123	4.10	48.78%
	10	Aplikasi TPB pada program & proyek pembangunan	55	1.83	116	3.87	47.41%
	Rerata		58.30	1.94	122.50	4.08	47.66%
	Total		583		1225		

Hasil analisis tingkat kesesuaian antara KE dengan KD pada parameter inklusi di Kabupaten Wonosobo tergolong rendah yaitu 47,66%. Indikasi tersebut dapat dilihat pada skor item 3, 4 dan 10. Kesulitan dalam menetapkan indikator lokal berakibat pembuatan kebijakan dan pengembangan kapasitas menjadi tidak efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya aplikasi TPB pada program dan proyek pembangunan. Capaian skor item 2, 5, 7 dan 9 adalah positif semu, karena tidak didukung item 3, 4, 5 dan 6.

Integrasi Vertikal dan Integrasi Horizontal

Tabel 9. Hasil Tingkat Kesesuaian Integrasi Vertikal dan Horizontal Kabupaten Wonosobo

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Integrasi TPB (Vertikal)	11	RPJMN	62	2.07	115	3.83	53.91%
	12	R P J M D Provinsi	59	1.97	126	4.20	46.83%
	13	R P J M D Kabupaten/ Kota	54	1.80	122	4.07	44.26%
	Rerata		58.33	1.94	121.00	4.03	48.33%
	Total		175		363		
Integrasi TPB (Horisontal)	14	Pengenalan/ Rekognisi	60	2.00	122	4.07	49.18%
	15	Adopsi	59	1.97	121	4.03	48.76%
	16	Adaptasi	58	1.93	126	4.20	46.03%
	17	Difusi	65	2.17	126	4.20	51.59%
	18	Transformasi	62	2.07	124	4.13	50.00%
	Rerata		60.80	2.03	123.80	4.13	49.11%
Total		304		619			

Hasil analisis IPA dari parameter integrasi vertikal dan integrasi horizontal, memiliki skor rerata tingkat kesesuaian antara KE dengan KD yang tergolong rendah yaitu masing-masing 48,33% dan 49,11%. RPJMD Kabupaten Wonosobo kurang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Perlu adanya upaya peningkatan organisasi dengan menerapkan *Whole of Government*. Hambatan

integrasi horizontal adalah pada item 15 dan 16, perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pendidikan dan pelatihan.

Koherensi

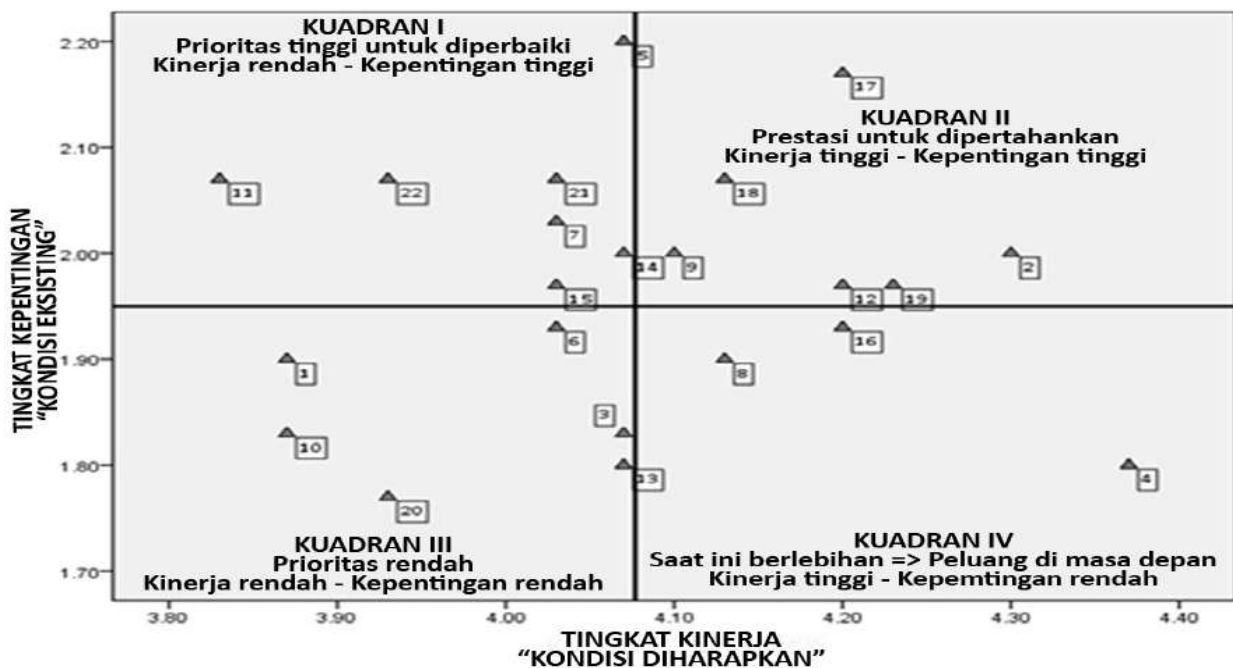
Tabel 10. Hasil Tingkat Kesesuaian Koherensi Kabupaten Wonosobo

Variabel	No.	Item Pernyataan	Total Skor (KE)	Rerata Skor (KE)	Total Skor (KD)	Rerata Skor (KD)	Tingkat Kesesuaian (%)
Koherensi	19	Koherensi kebijakan pada satu wilayah administratif	59	1.97	127	4.23	46.46%
	20	Koherensi kebijakan antar level administratif	53	1.77*	118	3.93	44.92%
	21	Koherensi kebijakan antar wilayah administratif	62	2.07	121	4.03	51.24%
	22	Koherensi kebijakan masa kini dan masa depan	62	2.07	118	3.93	52.54%
		Rerata	59.00	1.97	121.00	4.03	48.79%
	Total	236		484			

Hasil analisis IPA pada parameter koherensi diperoleh hasil rerata kesesuaian antara KE dengan KD adalah 48,79%. Indikasi dari skor tersebut menunjukkan bahwa kebijakan terkait TPB adalah kurang koheren, khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo sendiri dan antara Kabupaten Wonosobo dengan level administrasi di atasnya. Sehingga perlu adanya jejaring kebijakan lintas level dan lintas wilayah administrasi dan lintas sektor untuk meningkatkan derajat koherensi.

HASIL ANALISIS IPA WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO

2. Analisis Kuadran



Gambar 10. Kuadran Kabupaten Wonosobo Analisis Kuadran

Interpretasi dari hasil analisis kuadran Kabupaten Wonosobo, secara umum ekspektasi kinerja Kabupaten Wonosobo adalah kurang dari 4,10 lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Indikasi dari skor tersebut menunjukkan bahwa pelokalan dan implementasi TPB belum efektif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan diseminasi, sosialisasi dan promosi melalui SDGs Center.

Prioritas utama dalam upaya perbaikan adalah pada item-item sebagai berikut:

1. Item 5: Instrumen implementasi TPB dengan merancang instrumen kebijakan, regulasi, kelembagaan dan tatakelola.
2. Item 7: Kapasitas pengetahuan, sumberdaya finansial dan manusia, infrastruktur dari aktor dan stakeholder dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas.
3. Item 11: RPJMN, integrasi RPJMN masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa TPB belum terinklusi dan terintegrasi dengan RPJMD, dan kebijakan belum koheren dengan kebijakan pusat dan provinsi. Perlu adanya jejaring kebijakan dan koordinasi melalui SDGs center.
4. Item 14: Rekognisi, indikasi bahwa TPB belum dikenali dan dianggap penting. Sehingga perlu diseminasi, sosialisasi, promosi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan SDGs Center.
5. Item 15: Adopsi, Indikasi bahwa TPB belum di adopsi sebagai agenda kebijakan daerah. Perlu penetapan prioritas kebijakan yang sesuai dengan agenda 2030.
6. Item 21: Koherensi kebijakan antar wilayah administrasi, mengindikasikan aglomerasi teritorial dan agregasi untuk pertanian, wisata dan konservasi sumberdaya air. Perlu adanya kolaborasi teritorial untuk percepatan pelokalan dan implementasi TPB.
7. Item 22: Koherensi kebijakan kini dan masa depan, mengindikasikan bahwa kebijakan dan perencanaan pada saat ini masih berjangka pendek dan belum berorientasi pada masa depan. Perlu adanya skenario kebijakan dan perencanaan hibrid yang mengacu pada agenda 2030.

4.2.4. Hasil Analisis IPA pada Rekapitulasi Pelokalan

Tabel 11. Rekapitulasi Tingkat Pelokalan TPB

PARAMETER	PROVINSI JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	KABUPATEN WONOSOBO
Inklusi	71,22%	60,71%	47,66%
Integrasi Vertikal	74,65%	62,12%	48,33%
Integrasi Horizontal	71,25%	58,59%	49,11%
Koherensi Kebijakan	71,78%	60,68%	48,79%
Rerata Pelokalan	72,22%	60,53%	48,47%

Hasil analisis rekapitulasi pelokalan diperoleh hasil seperti pada tabel diatas, yaitu tingkat pelokalan TPB Provinsi Jawa adalah 72,22% tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kota Semarang yaitu 60,53% dan Kabupaten Wonosobo 48,47%. Persentasi pelokalan TPB merupakan hasil rerata penjumlahan dari persentase (%) inklusi, integrasi dan koherensi. Capaian pelokalan TPB pada 3 wilayah yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo masih dibawah

kondisi yang diharapkan (KD) dan harus ditingkatkan lagi hingga mencapai kondisi optimalnya. Pelokalan dan implementasi TPB dapat dipercepat secara efisien dan efektif apabila menggunakan instrumen, tool dan framework yang tepat.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil review/ penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perumusan, pengukuran dan penilaian indikator lokal TPB kurang didukung dengan ketersediaan data yang valid, reliabel dan berkualitas baik (jelas, akurat dan relevan/ tepat).
2. Belum ada instrumen, tool, metode, kerangka kerja (*framework*) dan kriteria baku dan terstandarisasi untuk merumuskan, mengukur dan menilai capaian pelokalan dan implementasi TPB.
3. Capaian pelokalan TPB Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo berturut-turut adalah tinggi, cukup tinggi dan rendah. Namun secara keseluruhan masih dibawah kondisi yang diharapkan, sehingga harus ditingkatkan hingga level optimalnya.
4. Belum ada lembaga khusus yang bertugas melakukan instrumentasi dan standarisasi indikator, metode, teknik analisis, *tool*, *framework* dan kriteria pelokalan dan implementasi TPB.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam review/penelitian pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah adalah sebagai berikut:

1. Tiap Provinsi membuat database yang dapat mendukung perumusan indikator TPB lokal, proses pelokalan dan implementasinya dengan *platform multi-tasking*, interaktif dan *user friendly*.
2. Membuat *dashbord* pelokalan dan implementasi TPB yang terintegrasi dengan *dashbord* nasional dari Bappenas.
3. Membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan instrumentasi dan standarisasi indikator, metode, *tool* dan *framework* perumusan, pengukuran dan penilaian implementasi TPB.
4. Melakukan program percepatan implementasi TPB dengan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait.
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pelokalan dan implementasi TPB.

DAFTAR PUSTAKA

- NRG4SD (2019), *Localizing SDGs: Regional Governments Paving the Way*, Report: NRG4SD – Centre for Environmental Law and Governance – University of Strahclyde, 2019.
- OosterhofDieuwkePytrik (2018), *Localizing the Sustainable Development Goals to Accelerate Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: The Current State of Sustainable Development Goal Localization in Asia and the Pacific*, Polict Brief -Asian Development Bank, 2018.
- Morita Kanako, Okitasari Mahesti, Matsuda Hiromi (2019), *Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia*, IR3S, 2019.
- Stepputat et al. (2016), *Cities on the agenda: Urban governance and sustainable development*, Research Report – Econstor, 2016.
- UNDP Indonesia (2016). *UNDP Indonesia Progress Report, ‘The Initiative To Support The Roll-Out Of The Sustainable Development Goals/SDGs In Indonesia: Riau Province Activities’*, 28 August 2016.
- UNDP Indonesia (2017). *UNDP Indonesia Annual Report, ‘The Initiative To Support The Roll-Out Of The Sustainable Development Goals/SDGs In Indonesia: Riau Province Activities: January–December 2016’*, February 2017.
- UCLG (2019), *Towards the Localization of the SDGs*, Global Task Force of Local and Regional Governments – UCLG, 2019.

A. NOTULENSI LOKAKARYA NASIONAL

Catatan kegiatan lokakarya nasional dengan judul: judul Pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pada Kebijakan, Rencana dan Program Pengelolaan Lingkungan Di Daerah.

Sesi 1

1. Review inklusi, integrasi, dan koherensi RPJMD dengan TPB oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan, Reza Muzzamil Jufri.

Resume:

a. TPB 6 Air Bersih

- TPB telah terinklusi dalam bentuk kebijakan yang koheren antara Gubernur dan Walikota Semarang terkait SPAM, dan telah ditindaklanjuti dengan RAD oleh Walikota Semarang. Namun demikian untuk daerah Kabupaten Wonosobo belum terinklusi, mengingat belum adanya Kebijakan Bupati.
- Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015, berjangka pendek (2015-2019), perlu kebijakan jangka Panjang dan berorientasi pada agenda 2030.
- Adanya program serumpun tentang pengelolaan air minum di Pemprov Jateng, Semarang dan Wonosobo mengindikasikan bahwa TPB telah terintegrasi secara vertikal dalam program pembangunan daerah.

b. TPB 6 Sanitasi

- TPB 6.2.1.(b) belum terinklusi untuk Daerah Provinsi, karena belum terdapat Kebijakan Kepala Daerah dan RAD untuk pelaksanaannya.
- TPB 6.2.1.(b) telah terinklusi untuk Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo, karena telah memiliki Kebijakan Kepala Daerah.
- Adanya program serumpun tentang pengelolaan air limbah di Pemprov Jateng, Semarang dan Wonosobo mengindikasikan bahwa TPB telah terintegrasi secara vertikal dalam program pembangunan daerah.

c. TPB 10 Pengentasan Kemiskinan

- TPB 10.1.1* telah terinklusi dengan baik dalam bentuk kebijakan yang koheren, dan Program Pembangunan Daerah telah terintegrasi dengan baik pada setiap level Pemerintahan.
- Tanda Bintang menandakan bahwa UMKM dijadikan prioritas utama untuk menciptakan ekonomi lokal dalam rangka mengatasi kesenjangan.

d. TPB 11 Kota dan Permukiman dan Berkelanjutan

- Secara keseluruhan TPB 11.1.1.(a) telah terinklusi, koheren dan terintegrasi dengan baik antara Pemerintah Provinsi Jateng, Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan TPB ini memiliki fungsi sebagai pendukung Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengimplementasikan TPB 11.1.1.(a).

e. TPB 13 Pencegahan Perubahan Iklim

- TPB 13 telah terinklusi dalam bentuk kebijakan yang koheren antara Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan visi membangun infrastruktur hi-

- jau, pertumbuhan hijau dan perekonomian hijau pada wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sebagai mitra Pemerintah Provinsi dalam mengimplementasikan TPB 13.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Kebijakan Kepala Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan RTH
- f. Sampai dengan TW3 Tahun 2020, secara umum kondisi pencapaian Program dan Kegiatan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan TPB 6, 10, 11, 13, masih dibawah 30% dari target akhir RPJMD pada tahun 2023.
- g. Pentingnya pelokalan SDGs
- Untuk mendekatkan SDGs dengan budaya masyarakat setempat.
 - Merumuskan indikator, target, sasaran dan capaian yang lebih spesifik.
 - Membuat arah pembangunan daerah menjadi lebih terinci dalam tujuan nasional yang holistik.
 - Pembangunan daerah dimulai dari yang bersifat lokal.
- h. Penguatan Kebijakan Kepala Daerah
- Penyusunan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan “Gerakan Bersama”, sebagai turunan dari Pasal 15 ayat (1) PERPRES Nomor 59 Tahun 2017.
 - Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota) untuk percepatan Pelokalan TPB.

2. Tanggapan atas pemaparan dari mahasiswa oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs. One Andang Wardoyo, M.Si.

Resume:

- a. Saat ini Kabupaten Wonosobo sedang menyusun RPJMD 2022-2026.
- b. Terdapat kesulitan untuk membumikan TPB yang sudah dibuatkan peta jalannya oleh Bappenas ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan di kabupaten didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
- d. Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah.
- e. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membuat daerah kurang leluasa dan ternyata SIPD belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada di Kementerian keuangan.
- f. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkadang tidak terlalu sinkron dengan TPB.
- g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terintegrasi dan memberikan arahan dalam skenario RPJMD dan terlihat dalam sasaran pembangunan dan araha kebijakan pemba-

ngunan.

h. Saran:

- Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang secara tidak tegas mengamankan daerah kabupaten/kota menyusun rencana aksi daerah (RAD) cukup mengikuti RAD provinsi perlu ditegaskan kembali.
- TPB dimasukkan kedalam dokumen-dokumen evaluasi yang berkaitan dengan insentif-insentif daerah, sehingga daerah lebih bersemangat dalam membumikan dan mengimplementasikan TPB.

3. Tanggapan atas pemaparan dari mahasiswa oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan Bappeda Kota Semarang, M. Lutfi Eko Nugroho, ST., MT.

Resume:

- a. Kota Semarang masih menggunakan meta data pertama yang dirilis oleh Pemerintah Pusat.
- b. Kota Semarang menyusun RAD TPB pada tahun 2018, dari 222 indikator yang harus ada di kota, Pemkot Semarang baru bisa mengukur 174 indikator, dengan rincian 84 indikator pilar sosial, 35 indikator pilar ekonomi, 38 indikator pilar lingkungan, dan 17 indikator pilar hukum dan tata kelola.
- c. Sebanyak 120 indikator masih harus dilakukan dengan upaya tambahan mengingat aspek capaian, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan pandemi COVID-19. Indikator tersebut harus masuk ke dalam dokumen RPJMD.
- d. Capaian pelayanan air minum Kota Semarang tahun 2020 sebesar 78,17%.
- e. Capaian penanganan sanitasi Kota Semarang terbagi menjadi dua tipologi sanitasi yakni yang sanitasinya layak sebesar 91,11% dan meningkatkan akses yang tidak aman sebesar 8,89%.
- f. Indikator yang digunakan oleh Pemkot Semarang berkaitan dengan TPB 10 adalah usaha penurunan angka kemiskinan bukan terkait UMKM.
- g. Berkaitan dengan TPB 11, target sisa permukiman kumuh di Kota Semarang adalah sebesar 0%, tetapi realisasinya masih menyisakan 22,08% permukiman kumuh. Hal tersebut dipengaruhi dari adanya refocusing akibat pandemi COVID-19.
- h. Pada RPJMD berikutnya Pemkot Semarang akan memasukkan ukuran emisi gas rumah kaca dengan baseline emisi GRK tahun 2020 sebesar 6.099.129,44 ton CO₂e yang kontribusi terbesarnya adalah sektor energi.
- i. RPJMD Kota Semarang 2022-2026 bersinergi dengan KLHS yang mengamatkan bahwa RPJMD harus bernafaskan TPB.

4. Tanggapan atas pemaparan dari mahasiswa oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Drs. Edi Wahyono, M.Si.

Resume:

- a. Alasan mengapa baru ada 16 kabupaten/kota yang menyusun RAD TPB adalah karena Perpres 59 Tahun 2017 mengamatkan bahwan RAD disusun oleh provinsi bersama kab/kota.
- b. Pada 2019/2020 sebetulnya provinsi sudah menganggarkan bantuan untuk kab/kota menyusun RAD TPB, tetapi karena pandemi COVID-19, bantuan tersebut dibatalkan.
- c. Aspek legal dan kelembagaan sudah cukup lengkap. Sudah terdapat Tim Koordinasi Daerah dan Pokja TPB Jateng, Tim Sekretariat TPB Jateng, SDGs Center Undip, dan Forum Non State Actor (NSA).
- d. Capaian kinerja TPB terkait penyusunan dokumen dan pelaporan:
 - Pergub No. 74 Th. 2018 tentang RAD SDGs/TPB Jawa Tengah Tahun 2017-2018
 - Pergub No. 62 Th. 2019 tentang RAD SDGs/TPB Jawa Tengah Tahun 2019-2023
 - Laporan Pencapaian TPB Jawa Tengah Tahun 2019
- e. Total indikator TPB Jateng tahun 2019 sebanyak 264 indikator, tahun 2020 mengalami perubahan menjadi 251 indikator dikarenakan terdapat 13 indikator tidak tersedia data dan tidak terdapat program/kegiatan dukungan di Jawa Tengah.
- f. Data yang tersedia dalam indikator TPB Jateng 2019 sebesar 71,59% dalam 189 indikator. Sedangkan data yang tersedia dalam indikator TPB Jateng 2020 sebesar 76,49% dalam 192 indikator.
- g. Capaian tertinggi kinerja TPB Tujuan 6 adalah sebesar 61,54% membaik, Tujuan 10 sebesar 37,50% belum tercapai, Tujuan 11 sebesar 37,50% tercapai, dan Tujuan 13 sebesar 66,67% membaik.
- h. Kelemahan terbesar adalah terkait dengan data, dan belum semua OPD di kab/kota masih belum aware terkait hal tersebut. Peningkatan kapasitas perlu dilakukan, barangkali bisa dilakukan oleh SDGs Center Undip.

Diskusi 1

1. Setyo Prabowo

Bagaimana caranya mengkaji capaian TPB dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Semarang?

Jawaban M. Lutfi Eko Nugroho, ST., MT:

Saat ini Kota Semarang sedang menyusun RPJMD dimana dalam penyusunan tersebut harus berdasarkan kepada KLHS. Prosesnya terdapat dalam KLHS. Terdapat 3 komponen utama dalam KLHS, yakni mengkaji capaian TPB dari masing-masing tujuan, membandingkan dengan target daerah dan nasional, penapisan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Sauki, Analisis Kebijakan Kemensos

Tujuan 1 dalam TPB adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Menerapkan secara nasional sistem upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua termasuk kelompok rentan yang paling miskin, dengan indikator diantaranya penyandang disabilitas, terlantar, lanjut usia, dan anak terlantar.

Tanggapan Drs. Edi Wahyono, M.Si:

Ultimate goal dari TPB adalah mengurangi segala bentuk kemiskinan. Pelaksanaan SPM di provinsi harus dilaksanakan bersama-sama. Tidak ada indikator mengenai berapa persen penyandang disabilitas yang terlayani dan berapa persen masyarakat terlantar yang terlayani karena merupakan akumulasi dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan keb/kota, sehingga yang berkaitan dengan disabilitas tidak ditargetkan tetapi menjadi kegiatan pendukung yang ada di RAD TPB.

3. Setyo Prabowo

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM karena data yang disajikan masih terlalu beranekaragam

Tanggapan Drs. Edi Wahyono, M.Si:

Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, setelah dilakukan konsultasi publik berkaitan dengan laporan evaluasi, Pemrov dalam waktu dekat (setelah PPKM Darurat), akan melakukan hal tersebut karena penting dan sudah bekerjasama dengan BPS. BPS sudah membuat sistemnya, pemda hanya tinggal memanfaatkannya.

Sesi 2

5. Jejaring-Kerja Lintas Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan, dan Program untuk Implementasi TPB dalam Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Lingkungan oleh Ketua SDGs Center Universitas Diponegoro, Dr. Drs. Amirudin, M.Si..

Resume:

- a. Kondisi eksisting lingkungan di Jawa Tengah pada tahun 2019:
 - Persentase RT yang memiliki akses terhadap air minum layak sebesar 86,82% di perkotaan dan 76,71% di pedesaan.
 - Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,29%.
 - Koefisien gini meningkat 0,001 terkonsentrasi di perkotaan.
 - Sebesar 84,34% proporsi RT telah mendapat akses rumah layak huni.
 - Total sebanyak 2.627 kejadian bencana terjadi.
- b. Bagaimanapun pola setting goals yang dikonstruksi suatu daerah, kemitraan adalah kekuatan inti yang menjadi penopang pencapaian tujuan SDGs.
- c. Urgensi jejaring kerja lintas kelembagaan dan program adalah memastikan penerapan prinsip inklusif (no one left behind) dan memastikan ada integrasi antara aktor negara dan aktor non-negara.
- d. Kolaborasi jejaring kerja dilakukan oleh pemerintah/parlemen, filantropi/bisnis/ industri, akademisi/universitas, dan OMS/komunitas/media.

- e. Jenis kemitraan: kemitraan pengetahuan, kemitraan pelaksanaan, dan kemitraan standarisasi.
- f. Cakupan kemitraan: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- g. Mekanisme pembiayaan:
 - Pendanaan terpisah
 - Pendanaan kolektif, semua sepakat menyediakan anggaran membiayai kegiatan KMP.
 - Anggaran bersama, semua bersepakat membuat anggaran bersama diputuskan bersama-sama.
- h. Lembaga jejaring memiliki potensinya masing-masing. Potensi perlu dioptimalisasi dan diwujudkan dalam kemitraan yang esensial.
- i. Simpulan dan saran:
 - Posisi kemitraan sebagai way of life dalam membangun, perlu diwujudkan dalam forum komunikasi SA-NSA.
 - Kemitraan bukan sekedar “mutual understanding” tetapi “mutual in actual practice” sesuai potensi kelembagaan dan kapasitas.
 - Kemitraan penting untuk menjamin terintegrasinya program dalam misi yang sama, gerakan bersama

Berbagai good practice menunjukkan arah baru, program kemitraan bukan sekedar memberi (CSR) tetapi create share value (CSV) menuju pencapaian SDGs yang lebih berkualitas.

B. LAMPIRAN

- Lampiran kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara

NAMA :
 INSTITUSI/ JABATAN :
 WILAYAH :
 NOMOR Telp/ HP :

:

TANGGAL :

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)
 NOMOR 6 = AIR BERSIH DAN SANITASILAYAK**

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda salah satu opsi pada masing-masing opsi RPJMD, Inklusi, Integrasi Vertikal, Integrasi Horisontal dan Kongruensi (Kesesuaian)

A 1 : MENINGKATKAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM YANG LAYAK (2020 – 2024)

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
6.1.1	Pencapaian Akses Air Minum Layak 100% dan Akses Air Minum Aman 15%	Peningkatan Keamanan sumber minum kualitas kuantitas air secara dan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORIZONTAL	
		perpipaan dan non perpipaan	<input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horizontal	<input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Peningkatan kapasitas operator dalam menyediakan sumber minum aman	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horizontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horizontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Peningkatan tata kelola pemerintahan dan institusi	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horizontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horizontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORIZONTAL	
			<input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
			<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Peningkatan kesadaran dan partisipasi komunitas	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Pelestarian Sumber daya air baku, pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya air baku (seperti bendungan dan pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan)	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORIZONTAL	
					<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek <input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

A 2 : MENINGKATKAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK (2020-2024)

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJM/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
6.1.2	Peningkatan Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Hingga 90% (termasuk 20% Sanitasi Aman) dan Menurunkan BAB Sembarangan Hingga 0%	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah (termasuk pengelolaan lumpur tinja dan sistem pembuangan), dan pengetahuan dan kemampuan teknis, dan kerja sama dengan multi-pihak (swasta dan akademisi)	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Penguatan fungsi dan pengaturan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
			<input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
	Pembuatan regulasi pengelolaan limbah memastikan implementasinya di daerah termasuk alokasi pendanaan untuk sanitasi, pembayaran wajib untuk layanan sanitasi, mekanisme insentif, hukuman, subsidi, dan kewajiban bagi rumah tangga untuk memiliki akses terhadap sanitasi aman.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	
	Penguatan implementasi program perubahan perilaku	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi	

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		untuk menghentikan praktik BAB sebaran, dan termasuk mekanisme pemonitoran secara berkala dan asistensi berkualitas bagi komunitas, desa, dan pemerintah daerah.	terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Pengembangan mekanisme pembayaan berkualitas, termasuk pembayaan inovatif, subsidi pintar, dan belanja berkualitas untuk pembangunan sanitasi.	Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Pembangunan Infrastruktur untuk akses mandiri ke	Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana	Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJM/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		sanitasi terpusat atau terlokalisasi	terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Lain-lain (Tanggapan dapat diisikan pada kolom RPJM/RAN, RPJMD)			<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)
NOMOR 10 = MENGURANGI KESENJANGAN / KETIMPANGAN**

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda salah satu opsi pada masing-masing opsi RPJMD, Inklusi, Integrasi Vertikal, Integrasi Horisontal dan Kongruensi (Kesesuaian)

B. 3 : MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN (2020 – 2024)

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
10.1.1	Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan	Peningkatan kualitas kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi yang lebih merata bagi masyarakat miskin dan rentan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
			terkait	terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
		Peningkatan kontribusi usaha mikro dan kecil bagi penurunan ketimpangan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Penguatan pajak system berkeadilan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
	Peningkatan ekonomi pedesaan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	
	Peningkatan asset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan, antara lain melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan (reforma agrarian dan perhutanan sosial)	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV, KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		Pengendalian inflasi dan harga pangan melalui optimalisasi tarif impor	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Lain-lain (Tanggapan dapat diisikan pada kolom RPJMN/RAN, RPJMD)			<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)
NOMOR 11 = KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN**

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda salah satu opsi pada masing-masing opsi RPJMD, Inklusi, Integrasi Vertikal, Integrasi Horisontal dan Kongruensi (Kesesuaian)

C. 4 : MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT SECARA BERTAHAP TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK, AMAN DAN TERJANGKAU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH (2020 – 2024)

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
11.1.1	Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan	Pemantapan pembiayaan dan perumahan rangka pembiayaan perumahan dan sistem primer sekunder dalam mewujudkan yang	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
	dan Perumahan Yang Layak, Aman dan Terjangkau Untuk Menciptakan Kota Tanpa Perumahan Kumuh (Roadmap TPB Sub-bab 2.1.1.1)	murah, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan Perumahan Rakyat (TAPER) dan dana jaminan sosial/pensiun	terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien berkelanjutan	tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program &Proyek			
		Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program &Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dengan sistem transportasi	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program &Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan,	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
			<input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
		Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan dasar infrastruktur permukiman.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJM/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		penyelenggaraan dan di perumuhan permukiman perkotaan.	terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program &Proyek	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program &Proyek			
	Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan perumahan untuk	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
			terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
	Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					Proyek			
		Lain-lain (Tanggapan dapat diisikan pada kolom RPJMN/RAN, RPJMD)			<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	

**TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)
NOMOR 13 = PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**

Petunjuk Pengisian :

Berilah tanda salah satu opsi pada masing-masing opsi RPJMD, Inklusi, Integrasi Vertikal, Integrasi Horisontal dan Kongruensi (Kesesuaian)

D. 5 : PENURUNAN EMISI DAN INTENSITAS EMISI (2020 – 2024)

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
13.2.1.(b) dan 13.2.1.(c)	Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi	Hutan, Lahan, dan Gambut Mengembalikan fungsi ekosistem, DAS, dan jasa lingkungan hutan; mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan, pemberdayaan dan pelestarian kehutanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
		Transportasi Tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi
		Pertanian Penguatan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana,	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					Program & Proyek			
	Energi Perluasan pelaksanaan efisiensi energi serta penyediaan energi baru terbarukan.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Inklusi <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	
	Industri Optimalisasi dan peningkatan efektivitas penggunaan energi dan bahan baku dalam proses produksi industri.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Inklusi <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Kebijakan, Rencana & Program	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwal/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					<input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
	Pengelolaan Limbah Tersedianya sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	
	Blue Carbon Mempertahankan luasan dan pengembalian fungsi ekosistem hutan bakau.	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> 1 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 2 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 3 Rencana terkait <input type="checkbox"/> 4 Rencana terkait	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi	

No	INISIATIF KEBIJAKAN	INDIKATOR/ STRATEGI	RPJMN/RAN KEMENTERIAN	RPJMD PROV/ KAB/KOTA	INKLUSI (Perpres, Pergub, Perwa/Perbup)	INTEGRASI		KOHERENSI
						VERTIKAL	HORISONTAL	
					Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek			
	Lain-lain (Tanggapan dapat diisikan pada kolom RPJMN/RAN, RPJMD)				<input type="checkbox"/> Tidak Ada Inklusi <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan / inisiatif <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan dan Rencana <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana & Program <input type="checkbox"/> Ada Kebijakan, Rencana, Program & Proyek	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Vertikal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Vertikal	<input type="checkbox"/> Tidak ada Integrasi Horisontal <input type="checkbox"/> Ada Integrasi Horisontal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada Koherensi <input type="checkbox"/> Ada Koherensi

NAMA :

TANGGAL :

INSTITUSI/ JABATAN :

WILAYAH :

NOMOR TELP/ HP :

PERTANYAAN WAWANCARA TERTULIS

1. Apakah di wilayah Anda memiliki agenda, kebijakan atau program khusus untuk mencapai tujuan SDGs Nomor 6 /10/ 11 atau 13?

Jawaban:

2. Apakah pemerintah daerah di wilayah Anda menggunakan target lokal atau nasional nasional sebagai indikator capaian kinerja ?

Jawaban:

3. Apakah Institusi Anda menggunakan sumber data yang sudah ada atau membuat basis data baru untuk mendukung Anda dalam mencapai SDGs nomor 6/10/11 atau 13 ?

Jawaban:

4. Jika Ya, apakah Institusi Anda secara rutin memantau atau melaporkan capaian kinerja indikator SDGs nomor 6/10/11 atau 13 ?

Jawaban:

a. Kepada siapa Institusi Anda melapor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kab)?

Jawaban:

b. Apakah Institusi Anda diminta untuk melaporkan atau apakah itu inisiatif sendiri?

Jawaban:

c. Bagaimana Indikator pelaporan dikembangkan atau dipilih?

Jawaban:

5. Portal Data mana yang pernah atau sering digunakan oleh institusi Anda?

Jawaban:

a. Apa pengalaman Institusi Anda dengan platform atau portal data tersebut?

Jawaban:

b. Indikator mana yang diakses dan digunakan oleh Institusi Anda? (harap berikan tautan atau sumber juga)?

Jawaban:

c. Apakah indikator dan sumber ini cukup memenuhi kebutuhan Institusi Anda? Jika Tidak, Berikan Alasannya?

Jawaban:

6. Apakah Institusi anda sudah membuat instrumentasi dan standarisasi tentang lokalisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi SDGs di daerah?

7. Apakah Institusi Anda sudah mempunyai platform untuk lokalisasi dan implementasi SDGs di daerah?
Jawaban:
8. Apa yang seharusnya menjadi komponen dan/atau elemen dari platform SDGs interaktif dalam konteks pengelolaan lingkungan di daerah?
Jawaban:
9. Institusi apa saja yang berkepentingan dan membutuhkan alat lokalisasi/pelokalan (*localising tool*) SDGs untuk pengelolaan lingkungan di daerah?
Jawaban:
10. Apakah Institusi Anda mengharapkan pihak lain diluar pemerintahan untuk menggunakan alat ini juga (misalnya LSM, Institusi Pendidikan, komunitas bisnis atau industri, Warga) ?
Jawaban:
11. Apakah perlu adanya jejaring kebijakan diantara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin koherensi kebijakan dalam hal lokalisasi dan implementasi SDG 6/10/11 dan 13?
Jawaban: (Jawaban “perlu” atau “tidak perlu”)
Jawaban:
- a. Jika jawabannya “Perlu”, apa alasannya dan dalam berbentuk apakah jejaring kebijakan itu secara kelembagaan (Misalnya contoh untuk SDG 6: Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi, dan Dewan SDA Kabupaten/Kota)?
- 1) Alasan:
 - 2) Bentuk kelembagaan dari jejaring kebijakan:
- b. Jika jawabannya “Tidak Perlu”, apakah alasannya dan bagaimana cara menjamin bahwa ada koherensi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota adalah koheren?
- 1) Alasan:
 - 2) Cara menjamin adanya koherensi kebijakan:
12. Mengingat bahwa Pembangunan Berkelanjutan beserta 17 tujuan-tujuannya (SDGs) bersifat kompleks, multi-level governance, multi-disiplin, dan multi stakeholders (3 M), tantangan utamanya adalah; koherensi kebijakan, koordinasi vertikal dan horisontal serta kemitraan yang solid, apakah perlu dibentuk suatu forum kebijakan, kemitraan, serta koordinasi lintas departemen dan lintas sektoral dalam bentuk **SDGs Center**?
Jawaban: (Jawaban “perlu” atau “tidak perlu”)
- a. Jika jawabannya “Perlu”, apa alasannya dan apa:
- 1) Alasan:
 - 2) Tugas pokok dan fungsinya:
 - 3) Pola pendekatan apa yang diterapkan untuk mewujudkan koordinasi vertikal dan horisontal yang solid:

4) Model kemitraan apa yang sebaiknya diterapkan oleh SDGs Center:

b. Jika jawabannya “Tidak Perlu”, apa alasannya dan bagaimana cara menerapkan koordinasi vertikal dan horisontal yang solid?

1) Alasan:

2) Cara penerapan koordinasi vertikal dan horisontal:

13. Lokalisasi dan implementasi SDGs di daerah mutlak membutuhkan instrumen-instrumen operasional dan kelembagaan seperti: penetapan indikator-indikator lokal, skala pengukuran, kriteria penilaian, dan lain-lain. Perlukah dibentuk instrumen kelembagaan berupa SDGs Lab dengan tugas dan fungsi khusus melaksanakan instrumentasi tentang lokalisasi dan implementasi SDGs di daerah?

Jawaban: (Jawaban “perlu” atau “tidak perlu”)

a. Jika jawabannya “perlu”, apa dan bagaimana alasannya, tugas pokok dan fungsinya, kerangka-kerja konseptual, dan alat bantu yang dipakai untuk instrumentasi?:

1) Alasannya:

2) Tugas pokok dan fungsinya:

3) Kerangka-kerja konseptual (*conceptual framework*) instrumentasinya?

4) Alat bantu (*tool*) yang dipakai untuk instrumentasi

b. Jika jawabannya “tidak perlu”, apa alasannya dan bagaimana cara melakukan instrumentasi?

1) Alasan:

2) Cara melaksanakan instrumentasi:

14. Perlukah adanya basis data lokal (*local database*) lokalisasi dan/atau implementasi SDGs yang terintegrasi dengan basis data nasional?

Jawaban : (Jawaban “perlu” atau “tidak perlu”)

a. Jika jawabannya “perlu”, apa alasan, relevansi, dan urgensinya?

1) Alasan:

2) Relevansi:

3) Urgensi

b. Jika jawabannya “tidak perlu”, apa alasannya dan bagaimana cara menjalankan lokalisasi dan/atau implementasi SDGs tanpa didukung dengan basis data yang terintegrasi?

1) Alasan:

2) Cara menjalankan lokalisasi dan/atau implementasi tanpa ada basis data terintegrasi:

15. Perlukah dibuat Dashboard Interaktif di tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) tentang SDGs sebagaimana Dashboard SDGs Indonesia yang dibuat oleh Bappenas?

Jawaban : (Jawaban “perlu” atau “tidak perlu”)

a. Jika jawabannya “perlu”, apa alasan, kedayagunaan, dan kemanfaatannya?

1) Alasan:

2) Kedayagunaan:

3) Kemanfaatan

b. Jika jawabannya “tidak perlu”, apa alasannya dan bagaimana sistem atau cara alternatif mengakses data/informasi tentang capaian kinerja lokalisasi dan/atau implementasi SDGs?

1) Alasan:

2) Sistem atau cara alternatif untuk mengakses data/informasi tentang capaian kinerja lokalisasi dan/atau implementasi SDGs:

16. Parameter-parameter apa saja yang dibutuhkan untuk mengukur dan menilai sejauh mana tingkat lokalisasi SDGs di daerah? **(memilih salah satu atau lebih)**

Koherensi kebijakan

Kerangka regulasi

Kerangka kelembagaan

Kerangka manajemen lingkungan

Kapasitas dan kapabilitas daerah dalam melokalisasikan dan mengimplementasikan SDGs di daerah

Kesiapan daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dalam melokalisasikan dan mengimplementasikan SDGs

17. Tipe visualisasi data/informasi apa yang sebaiknya **(memilih salah satu atau lebih)**

Maps

Diagram Batang

Diagram Pie

Grafik Laba-laba

Visualisasi lain yang anda rekomendasikan

18. Berilah nilai tentang kedayagunaan (*usability*) dan kemanfaatan (*utility*) dari alat bantu (*tool*) dibawah ini dengan mengisikan angka sesuai ketentuan dibawah:

1= Kedayagunaan dan kemanfaatannya tinggi sehingga harus ada

2= Cukup berdayaguna dan bermanfaat sehingga seharusnya ada

3= Tidak berdayaguna dan bermanfaat sehingga tidak perlu ada

Alat Bantu (tool)	Nilai Kedayagunaan dan Kemanfaatan
Peta interaktif yang sesuai dengan indikator SDGs lokal	

Fitur tampilan kawasan yang mirip untuk membandingkan status Institusi Anda berdasarkan kriteria (populasi, pendapatan, geografi....)	
Fitur pilihan wilayah yang ingin dibandingkan	
Tampilan kemajuan capaian kinerja lokalisasi & implementasi SDGs di wilayah anda dibandingkan dengan wilayah lain	
Tampilan capaian kinerja lokalisasi dan implementasi SDGs dari berbagai wilayah di Indonesia	
Tampilan jarak antara capaian kinerja aktual dengan target lokal, regional, dan nasional yang ditetapkan Anda	
Tampilan target lokal, regional, dan nasional tentang lokalisasi dan implementasi SDGs	
Tampilan peringkat wilayah di sebelah peta dengan indikator	
Rekomendasi umum menurut tujuan	
Fitur unduhan, unggahan, cetak peta dan bahan yang sesuai	
Fitur unduhan data untuk membuat grafik sendiri data untuk menghasilkan grafik sendiri	

19. Apakah ada sorotan inisiatif tertentu atas agenda, kebijakan, rencana, program atau proyek yang dapat mendukung lokalisasi dan implementasi SDGs No. 6/10/11 atau 13 pada konteks pengelolaan lingkungan di daerah ?

Jawaban:

20. Apakah ada Komentar lain?

Jawaban:

Dokumentasi Kegiatan:

PELAKSANA LIVE JUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

Kegiatan TPS dengan momentori kegiatan/sub-kegiatan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 urusan lingkungan hidup

Tujuan TPB

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- Kontribusi, Sertifikasi dan Revisasi Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai Media Transfer of Local dan Local
- Perencanaan untuk diurus kegiatan yang ada lingkungan hidup, dan PPLU yang Diusulkan dan Penertiban Daerah Provinsi
- Kontribusi, Sertifikasi dan Revisasi Perencanaan Energi dan Minera Non-Fossil, Mengingat dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Reserptasi
- Perencanaan Aspek dan Komposisi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Manajemen
- Perencanaan untuk diurus kegiatan yang ada lingkungan hidup, dan PPLU yang Diusulkan dan Penertiban Daerah Provinsi
- Perencanaan Penyuluhan dan Komunikasi Lingkungan Hidup
- Perencanaan Aspek, Kebijakan dan Investasi Prasarana Sempit Regional
- Kontribusi, Sertifikasi dan Revisasi Perencanaan Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai Media Transfer of Local dan Local
- Pengelolaan Perencanaan dan atau Kawasan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Perencanaan untuk Kawasan Lingkungan Hidup
- Kontribusi dan Sertifikasi Perencanaan Sumber Perencanaan
- Kontribusi dan Sertifikasi Perencanaan Linear Perencanaan
- Pembinaan dan pendampingan sampai
- Kontribusi, Sertifikasi dan Revisasi Perencanaan Energi dan Minera Non-Fossil, Mengingat dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Perencanaan Perencanaan dan atau Kawasan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Kontribusi, Sertifikasi dan Revisasi Perencanaan Energi dan Minera Non-Fossil, Mengingat dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Kontribusi, Sertifikasi dan Revisasi Perencanaan Energi dan Minera Non-Fossil, Mengingat dan Adaptasi Perubahan Iklim

Participants (18)

- 0. find a participant
- Seolah Pemasangan... (Host)
- Bangda Vahyu
- Panitia Lokakarya (Co-host)
- edson sagan
- 300021542043_SURINDI

Chat

terarik, mas di email ke kami.

Bernadia@wig-aspac.org

From Setyo Prabowo @WIG Pro... to Everyone:

Kapan ke wilayah Jateng. Bu pergilaaan sampai mli konsep IRRC?

To: SEND... (Direct Message)

Type message in Windows

Go to Settings to activate Windows